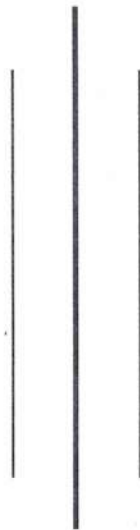




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2022**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : bpkadkabpemalang@gmail.com



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 2022/122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023 merupakan bagian dari Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021- 2026.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI PEMALANG,

Ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 050/255 / TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2023 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja BPKAD Tahun 2023 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2023 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2021-2026. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-2 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2021-2026. Renja BPKAD Tahun 2023 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2023 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun Anggaran 2023 dengan tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang, 29 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023	ii
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/ 255 / TAHUN 2022 TENTANG RENJA BPKAD TAHUN 2023	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LEMBAR PERNYATAAN KEPALA BPKAD KAB PEMALANG	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.3.1. Maksud	10
1.3.2. Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2021	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis BPKAD.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kab.Pemalang	35
2.3 Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2021	44
2.4 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	48
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	91
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	91
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan	93

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	98
3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang	101
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	103
3.2.1 Tujuan BPKAD	103
3.2.2 Sasaran BPKAD	104
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	106
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	112
BAB IV PENUTUP	132

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penjelasan Sub Kegiatan pada BPKAD yang Realisasi Anggarannya dibawah 85 %	17
Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2022	26
Tabel 2.3 : Hasil Opini BPK RI Atas LKD Pemerintah Kabupaten Pemalang	40
Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang	41
Tabel 2.5 : Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD	46
Tabel 2.6 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang 2023	60
Tabel 2.7 : Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	69
Tabel 2.8 : Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang	85
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran BPKAD Kab. Pemalang Tahun 2023 ..	105
Tabel 4.1 : Program, Kegiatan dan Anggaran pada BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang Mendukung Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goal's (SDG's).....	113
Tabel 4.2 : Target dan Realisasi Tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	115

DAFTAR GAMBAR

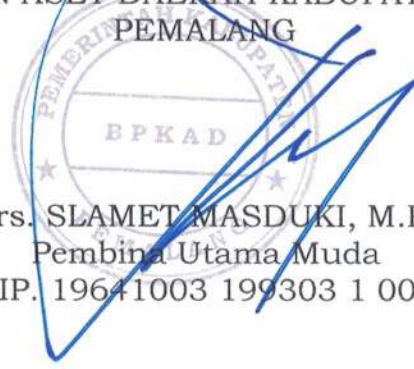
	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023.

Pematang, 29 Jul i 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PEMATANG



Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD pada Tahun 2023.

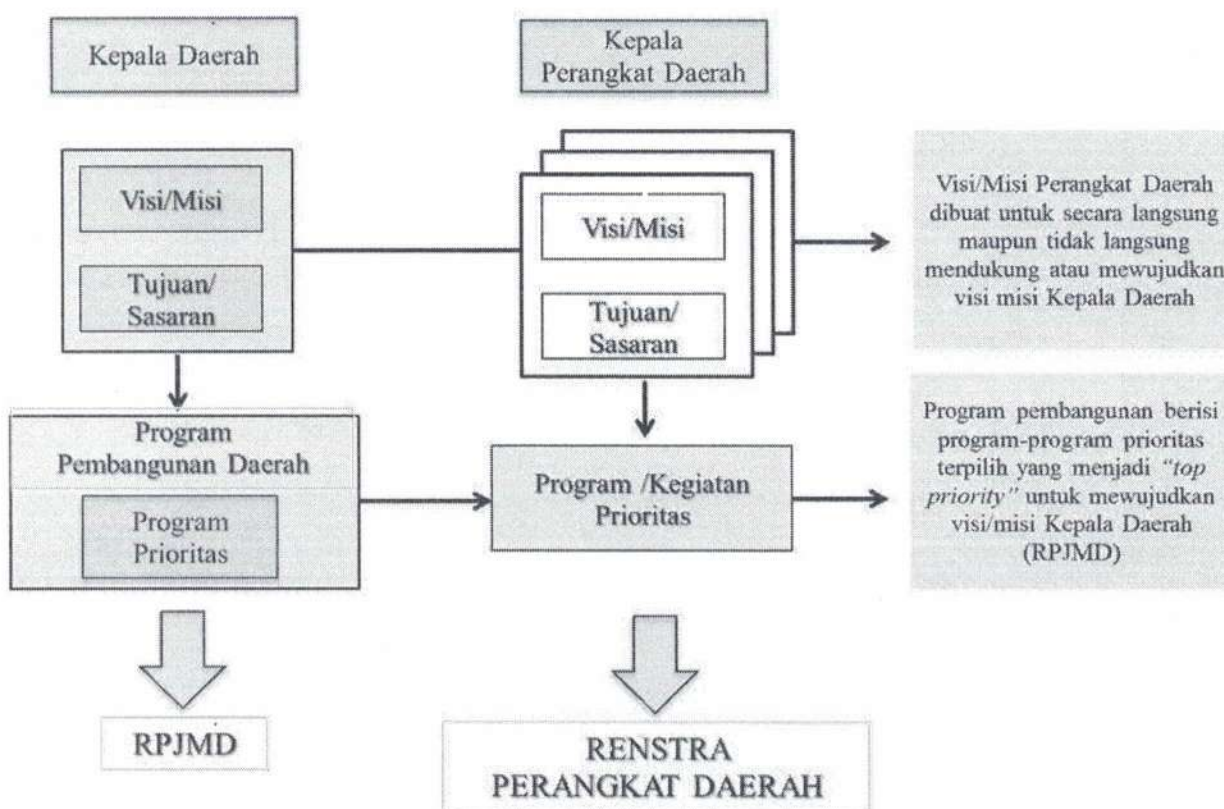
Selain sub kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, besaran Renja BPKAD termasuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa baik ADD, Dana Desa, Bantuan Keuangan khusus yang mengakomodir Pokok Pikiran DPRD, TMMD dan Musrenbang. Selain itu, di Renja BPKAD terdapat Belanja Tidak Terduga yang mengakomodir

pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana, korban bencana dan kondisi darurat mendesak lainnya termasuk penanggulangan pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Kegiatan yang diakomodir dalam Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 terkait Covid-19 merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Renja BPKAD juga mengakomodir sub Kegiatan Bagi Hasil pajak dan retribusi yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Pemalang yang telah berkontribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber Gambar : Permendagri No 86 Tahun 2017

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Program dengan 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Adapun hasil mapping program kegiatan dan sub kegiatan tersebut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Indikator Sub Kegiatan Tahun 2023 telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang terkait dengan pengelolaan keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai penjabaran atas Perda tersebut, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang. Selaku pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, BPKAD melaksanakan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023, senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indone]sia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (Covid19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah :

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pada seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD pada Tahun 2021 meliputi :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini didukung 7 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan sebagai berikut :*

- 1) 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) 01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) 01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- 5) 01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- 6) 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung 7 sub kegiatan sebagai berikut :*

- 1) 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) 02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) 02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
- 4) 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) 02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan

- 6) 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) 02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang hanya didukung 1 sub kegiatan sebagai berikut :*
 - 1) 05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung 10 sub kegiatan sebagai berikut :*
 - 1) 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) 06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - 7) 06.07 Penyediaan Bahan/Material
 - 8) 06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 10) 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 6 sub kegiatan sebagai berikut :*
 - 1) 07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) 07.05 Pengadaan Meubel
 - 4) 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) 07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) 07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 4 sub kegiatan sebagai berikut :*

- 1) 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) 08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. *Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didukung 8 sub kegiatan sebagai berikut :*

- 1) 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) 09.05 Pemeliharaan Meubeleur
- 4) 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) 09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 6) 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7) 09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) 09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada 5 Kegiatan yang mendukung program ini yaitu :

1. *Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
- 3) 2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 4) 2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) 2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- 3) 2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 4) 2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 2) 2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda
- 3) 2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

4. *Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2) 2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3) 2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

5. *Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) 2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah
- 2) 2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Program ini didukung oleh 1 Kegiatan yaitu :

1. *Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Kegiatan merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Kegiatan ini didukung 3 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) 03.2.01.07 Pengamanan BMD
- 2) 03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
- 3) 03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2021 di BPKAD sebesar Rp.518.427.237.020,00 dari anggaran sebesar Rp.523.168.109.502,00 atau 99,09%. Dari 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 8 Sub Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya dibawah 85%. Sub Kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1

PENJELASAN SUB KEGIATAN PADA BPKAD YANG REALISASI ANGGARANNYA DI BAWAH 85%

KODE PROG/KE G/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	9.600.000	4.768.500	49,57	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Anggaran. Dari Target anggaran sebesar Rp.9.600.000,00 realisasinya sebesar Rp.4.758.500,00 atau 49.57%. Rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya pembatalan pelaksanaan kegiatan verifikasi perubahan RKA SKPD Tahun 2021. Pembatalan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan PPKM yang melarang pelaksanaan rapat-rapat antar SKPD sehingga BPKAD tidak mengundang SKPD untuk melakukan verifikasi Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.
02.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	23.366.000	18.182.600	77,82	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Anggaran. Dari Target sebesar Rp.23.366.000,00 realisasinya sebesar

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					Rp.18.182.600,00 atau 77,82%. Penyerapan anggaran sub kegiatan ini kurang optimal disebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan verifikasi DPA SKPD. Kegiatan verifikasi DPA SKPD Tahun 2022 yang rencananya dilaksanakan pada akhir Desember 2021 ditunda pelaksanaannya karena SKPD tidak dapat mencetak DPA SKPD yang telah mencantumkan anggaran kas. RKA yang telah di entri pada SIPD tetapi belum menginput anggaran kas maka tidak dapat diteruskan sebagai DPA SKPD. Hal ini disebabkan SIPD belum mengupgrade sistimnya agar Pemda dapat mengentri anggaran kas SKPD pada bulan Desember 2021. Anggaran kas pada SIPD baru dapat di entri pada bulan Januari 2022. Sehingga verifikasi DPA SKPD Tahun 2022 baru bias dilakukan pada bulan Januari 2022.

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	22.221.000	16.222.000	73,00	Target sub kegiatan ini sebesar Rp.22.221.000,00 realisasinya sebesar Rp.16.222.000,00 atau 73%. Sama halnya dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD, penyerapan anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD ini pun tidak optimal disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga kegiatan verifikasi perubahan DPA SKPD tidak dilaksanakan.
02.2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52.000.000	29.474.900	56,68	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Perbendaharaan. Target sub kegiatan ini sebesar Rp.52.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.29.474.900,00 atau 56,68%. Penyerapan anggaran sub kegiatan ini tidak optimal disebabkan belanja jasa tenaga arsip yang biasanya dikeluarkan untuk jasa penataan arsip SP2D pada akhir tahun anggaran, tidak dibayarkan. Penataan arsip dibayarkan ketika proses SP2D menumpuk pada

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					akhir tahun sehingga Bidang Perbendaharaan membutuhkan tenaga non ASN untuk membantu penataan arsip SP2D. Pada akhir Tahun 2021, tidak terjadi penumpukan pencairan dana sehingga berkas SP2D pun tidak banyak atau arsipnya dapat ditangani oleh tenaga ASN pada Bidang Perbendaharaan.
02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.500.000.000	9.821.362.300	72,75	Sub Kegiatan ini dikelola oleh PPTK yang ada di Bidang Perbendaharaan. Target sub kegiatan ini sebesar Rp.13.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.821.362.300,00 atau 72,75%. Realisasi yang tidak optimal disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan tambahan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di 35 Kabupaten, dimana salah satunya adalah Kabupaten Pematang. Tambahan BLT dapat bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat miskin

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					di desa dan bersumber dari Belanja Operasional Dinas Sosial yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat kelurahan. Apabila Dana Desa dan Belanja Operasional Dinas Sosial tidak mencukupi untuk memberikan tambahan BLT kepada masyarakat miskin selama 3 bulan maka kekurangan tersebut dapat diambil dari sisa Belanja Tidak Terduga yang belum digunakan. Kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menghentikan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19 pada Tahun 2021 serta mencadangkan sisanya untuk jaga-jaga barangkali Dana Desa dan Belanja Operasional Dinas Sosial setelah dilakukan perhitungan, tidak mencukupi kebutuhan tambahan BLT untuk 3 bulan. Batas akhir penyaluran tambahan BLT tersebut adalah tanggal 7 Nopember 2021. Sampai dengan batas tersebut, baik

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial tidak menyampaikan kekurangan dana tambahan BLT 3 bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga tidak dilaksanakan penggeseran sisa Belanja Tidak Terduga setelah perubahan APBD Tahun 2021 untuk mencukupi kebutuhan Tambahan BLT 3 bulan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pematang. Sisa Belanja Tidak Terduga tersebut menjadi SILPA Tahun 2021.
03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.000.000	5.874.000	58,74	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Target anggaran kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.5.874.000,00 atau 74,89%. Penyerapan anggaran sub kegiatan ini kurang optimal disebabkan belanja

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					cetak yang rencana semula untuk mencetak Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana Kebutuhan Perubahan BMD (RKPBM) dan KIB hanya dilaksanakan untuk mencetak RKBMD saja. Hal ini disebabkan RKPBM dan KIB sedang dalam proses migrasi data sehingga Perangkat Daerah cukup mencetak melalui SIMDA BMD.
03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	654.000.000	444.644.760	67,99	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Target Sub Kegiatan ini sebesar Rp.654.000.000,00 dengan realiasinya Rp.444.644.760,00 atau 67,99%. Output kegiatan ini adalah Pemasangan patok pada tanah milik Pemda dan Jumlah Sertifikat tanah milik pemda yang selesai diproses. Untuk Pemasangan Patok telah dilaksanakan sesuai target yaitu 50 patok. Sedangkan Sertifikat Tanah Milik Pemda yang telah selesai

KODE PROG/ KEG/SUB KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2021	%	
					diproses pada Tahun 2021 belum memenuhi target karena dari 250 sertifikat yang ditargetkan hanya terealisasi 10 sertifikat yang terselesaikan. Hal ini berpengaruh pada serapan anggaran yang direncanakan untuk biaya pengukuran dan persiapan pelaksanaan sertifikasi menjadi tidak optimal.
03.2.01.09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.000.000	7.141.500	64,92	Sub Kegiatan ini dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Target sub kegiatan ini sebesar Rp.11.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.141.500,00 atau 64,92%. Penyerapan anggaran tidak optimal disebabkan pengurangan intensitas pengawasan pengelolaan aset daerah yang berada di luar kota karena diberlakukannya kebijakan PPKM.

Dari sisi realisasi output, hanya 1 (satu) sub kegiatan yang realisasi output kinerjanya tidak mencapai 100% yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Aset Daerah. Sub Kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) outputnya berupa jumlah papan identitas tanah milik pemda yang terpasang pada tanah milik Pemda dan jumlah sertifikat tanah milik Pemda yang telah selesai diproses pada tahun berkenaan. Pada Tahun 2021, Papan identitas ditargetkan terpasang pada tanah milik pemda sebanyak 50 unit dan target tersebut terealisasi 100%. Sedangkan sertifikat tanah ditargetkan selesai sebanyak 250 dokumen sertifikat tetapi sertifikat yang berhasil diproses hanya 10 sertifikat saja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengajukan dokumen persyaratan sertifikasi tanah milik Pemda sebanyak 240 berkas. Tetapi seiring berjalannya waktu, regulasi terkait persyaratan sertifikasi tanah milik Pemda berubah ubah. Hal ini mengakibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menemui kesulitan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2021, hanya 10 sertifikat yang terbit dari target yang direncanakan sebanyak 250 sertifikat atau hanya 4%.

Sehingga persentase ketercapaian total output Sub Kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Papan identitas (100\%)} + \text{Sertifikasi Tanah Pemda (4\%)}}{2} = 52\%$$

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel :2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

KODE PROG/KEG	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENSTRA BPKAD TAHUN 2021-2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN (RENJA BPKAD TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2022	
				TARGET RENJA BPKAD TAHUN 2021	REALIS ASI RENJA BPKAD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5 x 100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4 x 100%)
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Bidang Keuangan								
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	53,50	53,10	55,07	103,71%	53,20	54,16	101,23%
		Nilai SAKIP BPKAD	60,50	60,30	61,92	102,69%	60,40	61,16	101,09%
01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	12	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	48	70 dok	70 dok	100%	48 dok	48 dok	100%
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	90	415 dok	415 dok	100%	90 dok	90 dok	100%
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	48	70 dok	70 dok	100%	48 dok	48 dok	100%
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	90	415 dok	415 dok	100%	90 dok	90 dok	100%
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	57	32 lap	32 lap	100%	57 lap	57 lap	100%

	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (LKjIP, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan)							
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan Evaluasi Realisasi RKPDP Triwulanan, Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik bulanan)	16	0	0	0	16	16	100%
01.2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	48 org	48 org	100%	48 org	48 org	100%
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara, Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	25	25 dok	25 dok	100%	25 dok	25 dok	100%
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	64	0	0	0	64	64	100%
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	1	1	1	100%	1	1	100%
01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	18 lap	18 lap	100%	18 lap	18 lap	100%
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	1	1	100%
01.2.03	<i>Kegiatan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</i>	Tersedianya Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	1	0	0	0	1	1	100%
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada	17	0	0	0	17	17	100%

		SKPD (Laporan BMD Triwulanan, Semesteran dan Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD)							
01.2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	1	1 keg	1 keg	100%	1 keg	1 keg	100%
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengijuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60	32 org	32 org	100%	60 org	60 org	100%
01.2.06	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	10	10 dok	10 dok	100%	10 dok	10 dok	100%
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12 keg	12 keg	100%	12 keg	12 keg	100%
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	32	32 jenis	32 jenis	100%	32 jenis	32 jenis	100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	11	11 Jenis	11 jenis	100%	11 Jenis	11 jenis	100%
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	12 keg	12 keg	100%	12 keg	12 keg	100%
01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	50	25 buah	25 buah	100%	25 buah	25 buah	100%
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 Jenis	100%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50 keg	50 keg	100%	50 keg	50 keg	100%
01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	8	8 org	8 org	100%	8 org	8 org	100%
01.2.07	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	4	4 lap	4 lap	100%	4 lap	4 lap	100%
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	6	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

	Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang disediakan							
01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	9	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	100%
01.2.08	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	4	4 keg	4 keg	100%	4 keg	4 keg	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.800	7.800 dok	7.800 dok	100%	7.800 dok	7.800 dok	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8	8 org	8 org	100%	8 org	8 org	100%
01.2.09	<i>Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	7	7 keg	7 keg	100%	7 keg	7 keg	100%
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	50 unit	50 unit	100%	0 unit	0 unit	100%
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53	3 unit	3 unit	100%	53 unit	53 unit	100%

01.2.09.05	Pemeliharaan Meubeleur	Jumlah Mebeler yang dipelihara	5	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0	53 unit	53 unit	100%	0 unit	0 unit	100%
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	69,81%	116,35%	60%	60%	100%
		Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.01	<i>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	15	15	15	100%	15	15	100%
02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	1	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	5.000	5.000 dok	5.000 dok	100%	5.000 dok	5.000 dok	100%
02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	5.000	5.000 dok	5.000 dok	100%	5.000 dok	5.000 dok	100%

02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	5.000	5.000 dok	5.000 dok	100%	5.000 dok	5.000 dok	100%
02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	5.000	5.000 dok	5.000 dok	100%	5.000 dok	5.000 dok	100%
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	2	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten Pematang	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.02	<i>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	12	12	12	100%	12	12	100%
02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	48 lap	48 lap	100%	48 lap	48 lap	100%
02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan	5.740	5.740 lap	5.740 lap	100%	5.740 lap	5.740 lap	100%

	Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)								
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	1	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	1 dok	100%
02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	75	50 org	50 org	100%	75 org	75 org	75 org	100%
02.2.03	<i>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	11	11	11	100%	11	11	11	100%
02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	48	48 Lap	48 Lap	100%	48 Lap	48 Lap	48 Lap	100%
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14	14 Lap	14 Lap	100%	14 Lap	14 Lap	14 Lap	100%

02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	100%
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TP/TGR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	100%
02.2.04	<i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	90	100%	99,16%	99,16%	100%	100%	100%
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keunagan	1.700	1.700	1.700	100%	1.700	1.700	100%
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50	50 dok	68 dok	136%	50 dok	50 dok	100%
02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kavupaten/Kota	422	211 desa	211 desa	100%	211 desa	211 desa	100%
02.2.05	<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2	2 sistem	2 sistem	100%	2 sistem	2 sistem	100%

		Daerah Bidang Keuangan Daerah							
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	0	0	0	0	0	0	100%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100	100%	80,8%	80,8%	100%	100%	100%
3.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	8	100%	80,8%	80,8%	100%	100%	100%
3.2.01.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah Standar Harga yang disusun	2	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
3.2.01.05	Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%
3.2.01.07	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300	300	60	52%	300	300	100%
3.2.01.08	Penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	2 lap	2 lap	100%	2	2	100%
3.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	2 lap	2 lap	100%	2	2	100%
3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	235	286 dok	286 dok	100%	235	235	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disinkronkan dengan ketentuan pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah yang berlaku;
3. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring Hibah dan Bantuan sosial.
4. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
6. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
8. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur penggunaan rekening pada perangkat daerah.

9. Menyusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah.
10. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Menyusun Keputusan Bupati yang menunjuk Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah.
12. Menyusun Keputusan Bupati yang mengatur tentang penunjukkan Bendahar BOS pada SMP dan SD.
13. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
14. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang Perangkat Daerah;
15. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pematang;
16. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pematang;
17. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
18. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi untuk disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Menyusun Laporan Barang Milik Daerah Konsolidasi sebagai dasar pencatatan aset daerah pada Laporan Keuangan Daerah.
19. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
20. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;

21. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
22. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;
23. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
24. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
25. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
26. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
27. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
28. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
29. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
30. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas sesuai ketentuan yang berlaku;
31. Melaksanakan pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kinerjanya;
32. Melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Bantuan Keuangan untuk ADD, Dana Desa, TMMD, Bantuan Keuangan khusus hasil Musrenbang dan aspirasi anggota DPRD (Pokir) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinator pemerintahan desa;
33. Melaksanakan penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan;
34. Melaksanakan penyaluran Belanja Tidak Terduga berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan bencana dan korban bencana.
35. Melaksanakan penyaluran pengeluaran pembiayaan berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pembinaan BUMD;

36. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
37. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. PAD
 - 1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
 - 1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
 - 1.2. Lain-Lain PAD yang Sah
 - 1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
 - 1.2.2. Penerimaan Jasa Giro
 - 1.2.3. Penerimaan Bunga
 - 1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah
 - 1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
 - 1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan
 - 1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian
 - 1.2.8. Penerimaan Lain-Lain
 - 1.2.9. Pendapatan Sewa
2. Dana Perimbangan
 - 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 2.1.1. Bagi Hasil Pajak
 - 2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
 - 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 2.3. Dana Alokasi Khusus
 - 2.3.1. DAK Fisik
 - 2.3.2. DAK Non Fisik

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 3.1. Pendapatan Hibah
 - 3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah
 - 3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS
 - 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
 - 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
 - 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dan Efisien”*. Sedangkan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah *“Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel”*. Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut, ditentukan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu *“Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”*. Untuk mendukung tujuan BPKAD tersebut, terdapat dua sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melakukan penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang diperiksa setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk menghasilkan opini BPK RI. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah meraih opini BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut turut sejak Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Hasil opni BPK RI atas LKD Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Pemalang

Hasil Opini BPK	Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Untuk mempertahankan prestasi atas hasil yang telah diraih dalam pengelolaan keuangan berupa opini WTP tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan BPKAD berupa “ Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah “ dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
2. Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

Dalam upaya mewujudkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Sasaran 1	1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran 2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran 3. Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah 4. Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki
Sasaran 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Thn 2021	SPM / Standar Nasional	Indikator Program/IKK/Indikator SDGs	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15	8,175		Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	50%	-	100%	100%	
					Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60%	60%	60%	60%	69,51%	-	65%	65%	
2.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20	20		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15	1,1433		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
					Persentase Penyampaian	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

					Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan									
4.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	50%	34,8%		Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,08	79,78		Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	53,10	53,20	53,30	53,40	55,07	-	55	55	
					Nilai SAKIP di BPKAD	60,30	60,40	60,50	60,60	61,92	-	61	61	
Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKAD														
					Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga Kesehatan	13,14%	13,14%	13,15%	13,16%	10,35%		11%	11%	
					Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-4,91%	-4,90%	-4,89%	-4,88%	-11,01 %		-10%	-10%	
					Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	4,25%	4,25%	4,23%	4,22%	5,67%		4,22%	4,22%	
					Manajemen Aset (Semua kriteria	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

					dalam management aset terpenuhi = 100% , Hanya 3 kriteria = 75%, Hanya 2 kriteria = 50%, Hanya 1 kriteria = 25%, Semua Kriteria tidak terpenuhi = 0%) Kriteria : Apakah ada daftar aset tetap?									
					Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
					Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
					Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Indikator SDGs														
					Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3. Hasil Evaluasi SAKIP pada BPKAD Tahun 2021

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dievaluasi setiap tahun sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pemalang. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Adapun Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/827/RHS/2019 tanggal 6 Mei 2019 adalah 56,84 dengan kategori CC. Pada Tahun 2020, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor : 700/194/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020 nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang naik menjadi 60,26 dengan kategori B (Baik). Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor : 700/56/EVS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, Nilai SAKIP BPKAD sebesar 61,92 dengan kategori B (Baik). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja BPKAD pada

Tahun 2019, 2020 dan 2021 sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja tetapi perlu sedikit perbaikan.

Pencapaian nilai SAKIP yang baik, disertai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang baik serta penilaian Zona Integritas yang mencukupi merupakan komponen bagi perangkat daerah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah pada halaman 39 menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) ketika melaksanakan evaluasi internal satuan kerja adalah memastikan bahwa hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal “B” untuk WBK dan minimal “BB” untuk menuju WBBM. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan kategori B untuk 2 (dua) tahun berturut turut yaitu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, dinyatakan layak untuk mengikuti evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2022.

Komponen Zona Integritas yang harus dipenuhi meliputi banyak aspek. Selain Nilai SAKIP minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM, komponen lain yang harus diperhatikan dan dipenuhi satuan kerja adalah tindak lanjut terhadap hasil pengawasan APIP/BPK selesai 100%, tingkat kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN, tren capaian kinerja tahun sebelumnya, penerapan inovasi dan komitmen serta pemahaman pimpinan dan pegawai terhadap zona integritas dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menggali potensi untuk melaksanakan inovasi kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel.2.5
Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD

KOMPONEN SAKIP	LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG		
	Nomor:700/827/RHS/2019 Tanggal : 6 Mei 2019	Nomor: 700/194/VI/2020 Tanggal : 10 Juni 2020	Nomor: 700/56/EVS/2021 Tanggal : 12 Agustus 2021
	2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	23,19	23,19	23,19
Pengukuran Kinerja	15,63	15,63	15,63
Pelaporan Kinerja	7,15	7,15	7,15
Evaluasi Internal	0,63	0,80	1,21
Capaian Kinerja	10,25	13,50	14,75
NILAI SAKIP BPKAD	56,84	60,26	61,92

Rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Nomor : 700/56/EVS/2021 tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan belum dilengkapi dengan target pencapaian;
2. Terdapat indikator sasaran yang tidak relevan karena masih berorientasi pada output kegiatan yaitu indikator penatausahaan aset daerah;
3. Dokumen renja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
4. Rencana aksi belum digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan;
5. Pengukuran kinerja belum sampai ke level pelaksana (individu) yang mendukung tugas dan fungsi atasannya;
6. Indikator sasaran masih menggunakan istilah tepat waktu, mestinya setelah tepat waktu tersebut tercapai maka perlu meningkatkan substansi dari indikator sasaran tersebut;
7. LKjIP belum menyampaikan tentang ketercapaian indikator sasaran;
8. Target dan capaian indikator sebaiknya menggunakan data kuantitatif untuk mempermudah membandingkan tingkat ketercapaian dari tahun ke tahun.

Rekomendasi atas LHE tersebut telah ditindaklanjuti BPKAD sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan BPKAD telah mencantumkan target pencapaian. Pada Renstra Tahun 2021-2026, indikator Tujuan BPKAD ada 2 yaitu :
2. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan Target 80
3. Persentase Pemanfaatan BMD dengan target 93%
4. Pada Periode Renstra Tahun 2016-2021 terdapat Indikator Sasaran berupa “Persentase Pemanfaatan Aset Daerah”, sesuai dengan rekomendasi Inspektorat maka pada periode Renstra Tahun 2021-2026, Indikator Sasaran tersebut telah diubah menjadi “Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki”. Perubahan Indikator sasaran yang baru tersebut bersifat kualitatif dan merupakan solusi atas isu strategis di BPKAD terkait penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemda;
5. Pagu indikatif renja telah dimasukkan pada aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Entrian renja pada SIPD tersebut telah digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA/DPA pada tahun berkenaan;
6. Monitoring ketercapaian output telah dilaksanakan secara berkala baik dari tingkatan sub kegiatan, kegiatan dan program. Pelaksanaan monitoring berpedoman pada rencana kegiatan yang tertuang pada dokumen rencana aksi ataupun Perjanjian kinerja;
7. Perjanjian Kinerja Individu telah disusun sampai dengan level pelaksana, meskipun belum dilakukan oleh seluruh pelaksana pada BPKAD, tetapi secara bertahap perjanjian kinerja individu tersebut akan diwajibkan kepada seluruh pelaksana di BPKAD, termasuk laporan ketercapaian kinerja individu yang disampaikan secara triwulanan.
8. Indikator sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026 sudah tidak lagi menggunakan istilah tepat waktu tetapi menggunakan data kuantitatif untuk mempermudah penyandingan ketercapaian dengan tahun sebelumnya.
9. LKjIP Tahun 2021 telah menyampaikan tentang ketercapaian indikator sasaran pada tahun berkenaan dan ketercapaian pada tahun tahun sebelumnya. Ketercapaian Indikator sasaran tersebut tercantum pada LKjIP BPKAD Tahun 2021 BAB III Huruf A Halaman 55.

10. Target indikator tujuan dan target indikator sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026 telah menggunakan data kuantitatif, sesuai rekomendasi inspektorat. Satuan target indikator tujuan dan indikator sasaran menggunakan Bobot Nilai, Persentase dan Indeks.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsi Bendahar Umum Daerah (BUD). Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dari sisi Pengamanan maupun pemanfaatannya. Selain terkait Barang Milik daerah, terdapat isu strategis lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi pengelolaan keuangan daerah, penggunaan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah dan pergantian regulasi pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Isu strategis tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Keterbukaan informasi dan data pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi isu yang seksi, sehingga menarik banyak pihak untuk menuntut

transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan upload data perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan pada website Pemerintah Daerah dan menjadikan publikasi data tersebut menjadi salah satu komponen pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat intens dalam melaksanakan monitoring transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) yang dilaksanakan secara berkala. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi kewajiban yang harus diindahkan oleh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah berupa pemasangan patok pada Tanah Milik Pemda dan Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan upaya mendapatkan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dalam rangka meminimalkan kemungkinan barang milik daerah yang hilang karena belum dimilikinya bukti kepemilikan. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sangat concern dan focus pada upaya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pematang Jaya. Jumlah Tanah Milik Pemkab Pematang Jaya 2.175 Bidang, yang telah bersertifikat sebanyak 757 Bidang atau 34,80%. Percepatan Sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang Jaya menjadi isu strategis mengingat hal tersebut menjadi salah satu target kerja Presiden Joko Widodo. Dalam upaya mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) untuk sertifikasi tanah aset instansi pemerintah dan pemerintah daerah melalui surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nomor : KU.01.04/1301-100/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berupaya untuk mendukung sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang Jaya dengan mengaokasikan anggaran sertifikasi tanah pada DPA BPKAD Tahun 2021 sebesar Rp.750.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp.1.500.000.000,00.

3. Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diikuti dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta turunannya. Regulasi tersebut menuntut pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian akun pendapatan dan belanja, nomenklatur program dan kegiatan serta penyesuaian penanggungjawab urusan. Hal ini bukan hal mudah, karena regulasi keluar setelah APBD ditetapkan, sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan mapping atas kode rekening dan nomenklatur program kegiatan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya wajib menyesuaikan regulasi daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti : Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Hibah dan Bansos, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Aplikasi Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengelolaan barang milik daerah.

4. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021, penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami dilema yang mengakibatkan perbedaan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Pada Tahun 2021, penyusunan APBD menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sedangkan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menggunakan SIMDA. Penggunaan aplikasi yang tidak sama tersebut, memberikan sedikit kendala dalam penyusunan APBD terutama dalam penyajian lampiran APBD yang tidak tersedia formatnya di SIMDA. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya merencanakan menggunakan 2 aplikasi pengelolaan keuangan yaitu SIPD untuk penganggaran dan FMIS (Financial Management Informasi Sistem) untuk Keseluruhan pengelolaan keuangan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Kinerjanya. Diharapkan pada Tahun 2023, dengan menggunakan FMIS maka Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah memiliki satu sistem yang terintegrasi.

Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain : Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya

dan Himpunan Peraturan Bupati Pematang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pematang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pematang. Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pematang;

- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang terkait dengan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pematang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, motivasi, kemauan kerja yang tinggi serta kemampuan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Kurangnya koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- Penempatan pegawai yang tidak mempertimbangkan kompetensi, latar belakang Pendidikan dan kebutuhan organisasi;
- Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan penggunaan sistem aplikasi pengelolaan daerah (SIPD) tanpa adanya pendampingan pada saat implementasinya.
- Amanat pemerintah pusat terkait "Satu Data Indonesia" yang tidak disertai dengan penyediaan sarana prasarana yang cukup untuk menyediakan sistem aplikasi yang terintegrasi.
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang belum bersertifikat.
- Belum adanya database pemanfaatan aset daerah yang dikelola dengan sistem sewa.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalannya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan terkait dengan penempatan penyimpanan uang daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan Penerimaan Bagi Hasil BUMD, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta monitoring pelaporan pajak, Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan Dana Perimbangan dan Belanja Transfer, Kementerian Dalam Negeri terkait Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, yang dapat dilihat dari hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BPKAD;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku serta mempublikasikan data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui website Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah serta Website Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pemalang.

- Tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Pemalang untuk 5 (lima) tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016,2017,2018, 2019 dan 2020. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum yang disertai dengan regulasi lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah mewajibkan Pemerintah Daerah menyesuaikan kebijakan daerah melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial, Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Peraturan, Peraturan Bupati yang mengatur Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan dan pelaporannya ;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk Bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya. Penyaluran Belanja tersebut membutuhkan kompetensi ASN yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi dan perubahannya terkait penyaluran belanja-belanja tersebut, kemampuan dalam menyusun pelaporan realisasi belanja khususnya belanja yang bersumber dari Dana Transfer yang tidak disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, tetapi harus dicatat pendapatan dan belanjanya pada laporan Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni”. Adapun uraian dari masing- masing frasa pada Visi tersebut adalah :

- **Adil**, adalah Keadaan / kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- **Makmur**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya;
- **Agamis**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup;
- **Ngangeni**, adalah Kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Adapun Misinya adalah :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dari misi Kabupaten Pemalang tersebut, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 2 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan adalah :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM yang mengelola pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa, belum adanya sistim aplikasi yang mengakomodir/mengelola database pemanfaatan aset daerah dengan sistim sewa serta administrasi penyimpanan dokumen perjanjian sewa yang kurang memadai. Hal ini mengakibatkan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena Pemerintah Daerah belum memiliki bukti kepemilikan tanah Pemda yang cukup dan sesuai ketentuan.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi. Sehingga data aset tetap dan penyusutannya belum otomatis dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang termasuk penyaluran Dana Desa.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN di BPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.

4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
5. Adanya perjanjian kinerja individu dan penilaian kinerja bagi ASN melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu. Hal ini memberi support pada masing-masing ASN untuk melaksanakan tugasnya secara tuntas dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.6 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02					Urusan Penunjang Bidang Keuangan				487.897.764.000					487.897.764.000	
5	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	BPKAD	53,30	8.920.102.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD		53,30	8.920.102.000	
							Nilai SAKIP BPKAD	BPKAD	60,50			Nilai SAKIP BPKAD		60,50		
5	02	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	BPKAD	12 Dok	25.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah		12 Dok	25.500.000	
5	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	3 dok	3.000.000	
5	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	48 dok	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BPKAD	48 dok	500.000	
5	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	90 dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BPKAD	90 dok	3.000.000	
5	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	48 dok	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	BPKAD	48 dok	3.000.000	
5	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	90 dok	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	BPKAD	90 dok	16.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	6.722.043.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	7 dok	6.722.043.000	
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	48 org	6.707.243.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	48 org	6.707.243.000	
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	25 dok	14.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara, Keputusan BPKAD Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS, Keputusan Bupati tentang Pengelola Barang dll)	BPKAD	25 dok	14.000.000	
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LKD, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah)	BPKAD	1 Lap	800.000	
5	02	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	280.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	BPKAD	1 Jenis	280.000.000	
5	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	60 org	280.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	60 org	280.000.000	
5	02	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	642.559.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	BPKAD	10 dok	642.559.000	
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 keg	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	BPKAD	12 keg	3.000.000	
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	32 paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BPKAD	32 paket	50.000.000	
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	11 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	BPKAD	11 Paket	30.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	12 Dok	5.000.000	
5	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	BPKAD	25 paket	3.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	BPKAD	25 paket	3.000.000	
5	02	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	2 Lap	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	2 Lap	100.000.000	
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	50 Lap	447.559.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	50 Lap	447.559.000	
5	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	8 Dok	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	8 Dok	4.000.000	
5	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	4 lap	145.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD sesuai ketentuan	BPKAD	4 lap	145.000.000	
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	2 unit	145.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Komputer dll)	BPKAD	2 unit	145.000.000	
5	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD	4 keg	915.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa yang menunjang operasional perangkat daerah	BPKAD	4 keg	915.000.000	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	7.800 dok	15.000.000	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	7.800 dok	15.000.000	
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 jenis	665.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPKAD	4 jenis	665.000.000	
5	02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	30 unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BPKAD	30 unit	10.000.000	
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	8 org	225.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BPKAD	8 org	225.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	BPKAD	7 keg	190.000.000	Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah		7 keg	190.000.000	
5	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	BPKAD	53 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		53 unit	150.000.000	
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BPKAD	10 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10 unit	10.000.000	
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	2 unit	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 unit	15.000.000	
5	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	15.000.000	
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%	477.268.562.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan		100%	477.268.562.000	
							Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	BPKAD	60%			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		60%		
							Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase SP2D yang terbit sesuai Ketentuan		100%		
							Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan		100%		
							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan		100%		
5	02	02	1	01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	BPKAD	15 dok	515.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah		15 dok	515.000.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	1	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	100.000.000	
5	02	02	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	1 dok	30.000.000	
5	02	02	1	01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda tentang APBD dan Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	2 dok	200.000.000	
5	02	02	1	01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	5 dok	185.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	5 dok	185.000.000	
5	02	02	1	03		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	12	295.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	12	295.000.000	
5	02	02	1	03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	48 lap	94.747.500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	48 lap	94.747.500	
5	02	02	1	03	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan	BPKAD	5.740 lap	93.252.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotogan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Relaisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan	BPKAD	5.740 lap	93.252.500	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
5 02 02 1 03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	55.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	BPKAD	1 dok	55.000.000	
5 02 02 1 03 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	75 org	52.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	BPKAD	75 org	52.000.000	
5 02 02 1 04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	11	162.400.000	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	11	162.400.000	
5 02 02 1 04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	14 Lap	17.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	14 Lap	17.000.000	
5 02 02 1 04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	38.000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	1 Lap	38.000,000	
5 02 02 1 04 05	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	BPKAD	2 dok	107.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	BPKAD	2 dok	107.400.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	1	05		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	100%	476.227.662.000	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	BPKAD	100%	476.227.662.000	
5	02	02	1	05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	1.700	453.725.103.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	1.700	453.725.103.000	
5	02	02	1	05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 dok	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	50 dok	10.000.000.000	
5	02	02	1	05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	211 desa	12.502.559.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	211 desa	12.502.559.000	
5	02	02	1	06		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	68.500.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 keg	68.500.000	
5	02	02	1	06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	2 sistem	22.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BPKAD	2 sistem	22.000.000	
5	02	02	1	06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pamalang	BPKAD	70	46.500.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten pemalang	BPKAD	70	46.500.000	
5	02	03	1			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	1.709.100.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	100%	1.709.100.000	
5	02	03	1	01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%	1.709.100.000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	BPKAD	100%	1.709.100.000	
5	02	03	1	01	07	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	300	1.508.500.000	Pengamanan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	300	1.508.500.000	

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan/ Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 03 1 01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	235	180.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	235	180.000.000	
5 02 03 1 01 12	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD		20.600.000	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD yang disusun	BPKAD		20.600.000	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musrenbangdes/ Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/ musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terdapat 101 usulan masyarakat yang diakomodir BPKAD melalui Program Pengelolaan Keuangan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Adapun rincian usulan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
 (Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan / Musrenbang)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN (RANGKING)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN					
	<i>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa</i>					
1	Pembuatan sumur dalam di desa Ambowetan	Ambowetan Ulujami	Terlaksananya pembuatan sumur dalam di desa Ambowetan	3 unit @ 100m	Musrenbang Kecamatan Ulujami 2021 No. 5	150.000.000
2	Pembangunan Talud Jalan Pertanian Blok 13 (Krantilan) dan Pembangunan Jembatan Blok 13 (Krantilan) di Desa Babakan	Babakan Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pertanian Blok 13 (Krantilan) dan Pembangunan Jembatan Blok 13 (Krantilan) Desa Babakan	Volume 310 m X 2 sisi dan Volume 4 m X 6 m	Musrenbang Kecamatan Bodeh	297.300.000

3	Jalan Rabat Beton dan Dinding Penahan Tanah Desa Badak	Badak	Belik	Terlaksananya Jalan Rabat Beton dan Dinding Penahan Tanah Desa Badak	Volume 160 m x 3,5 m x 0,15 ; 10 x 0,4 x 3	Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 Nomor 6	125.000.000
4	Pembangunan Talud Jalan Ukuran 240 x 0.5 x 0.3 M RT.01 Rw.01 desa Banglarangan Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 2	Banglarangan	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan RT.01 Rw.01 desa Banglarangan	Ukuran 240 x 0.5 x 0.3 M	Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 2	119.000.000
5	Pembangunan Talud menghubungkan Desa Banjaran dan Jebed Utara (1.500 M X 0,9 M) Desa Banjaran Kecamatan Taman Musrenbang Kec 05	Banjaran	Taman	Terlaksananya Pembangunan Talud menghubungkan Desa Banjaran dan Jebed Utara Desa Banjaran Kecamatan Taman	1.500 M X 0,9 M	Musrenbang Kec Taman No 05	160.000.000
6	Peningkatan jalan usaha Tani II 350 m X 3 m desa Banjarsari (Musrenbang Kec. Bantarbolang 07)	Banjarsari	Bantarbolang	Terlaksananya Peningkatan jalan usaha Tani II di desa Banjarsari	350 m X 3 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang 07	152.768.000
7	Pembangunan saluran irigasi , jalan dan talud jalan usaha tani dusun semiliran desa Bantarbolang 1.000 m X 3 m X 0,50 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 06)	Bantarbolang	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan saluran irigasi , jalan dan talud jalan usaha tani dusun semiliran desa Bantarbolang	1.000 m X 3 m X 0,50 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang 06	160.000.000
8	Pembangunan Drainase RW 6, 700 m x 50 cm x 40 cm (Musrenbang Kecamatan Moga 3)	Banyumudal	Moga	Terlaksananya Pembangunan Drainase RW 6	700 m x 50 cm x 40 cm	(Musrenbang Kecamatan Moga 3)	290.000.000
9	Jalan Rabat Beton antar Desa Batusari ke Desa Pulosari (Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022 No 2)	Batusari	Pulosari	Terlaksananya Jalan Rabat Beton antar Desa Batusari ke Desa Pulosari		Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022 No 2	150.000.000

10	Pembangunan Drainase Dukuh Pekutukan RT.24-25,RW.06, Volume p=350 m kanan dan kiri (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2022 Nomor Urut 3)	Beluk	Belik	Terlaksananya Pembangunan Drainase Dukuh Pekutukan RT.24-25,RW.06 kanan dan kiri	Volume p=350 m	Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2022 Nomor Urut 3	400.000.000
11	Saluran Drainase Desa Beluk, Volume 0,4 x 0,4 x 250, gorong-gorong 0,5 x 0,5 x 8 (2 Unit) (Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 nomor 4)	Beluk	Belik	Terlaksananya pembuatan Saluran Drainase Desa Beluk dan gorong-gorong 0,5 x 0,5 x 8 (2 Unit)	Volume 0,4 x 0,4 x 250 dan Volume 0,4 x 0,4 x 250	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 nomor 4	150.000.000
12	Pembuatan sender kali Si Cumplung dengan volume 800x0,40x1,5 desa Blendung (Musrenbang Kecamatan Ulujami Tahun 2022 No. 2)	Blendung	Ulujami	Terlaksananya Pembuatan sender kali Si Cumplung desa Blendung	volume 800x0,40x1,5	Musrenbang Kecamatan Ulujami Tahun 2022 No. 2	380.000.000
13	Pembangunan Talud Jalan Saluran Irigasi CT 02 Desa Blimbing	Blimbing	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan dan Saluran Irigasi CT 02 Desa Blimbing	Ukuran 130 x 0.3 x 1.2 M	Hasil Musrenbang KecAmpelgading Nomor 6	84.188.045
14	Peningkatan Jalan Desa Bodas - Pagelaran Desa Bodas Kecamatan Watukumpul dengan volume 337x3x0,12 m dan perkiraan dana (musrenbang Watukumpul 2021 01)	Bodas	Watukumpul	Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Bodas - Pagelaran Desa Bodas Kecamatan Watukumpul	dengan volume 337x3x0,12 m	Hasil musrenbang Kec Watukumpul 2021 Nomor 01	160.000.000
15	Peningkatan Jalan Desa Bongas - Tlagasana, Desa Bongas Kecamatan Watukumpul)	Bongas	Watukumpul	Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Bongas - Tlagasana, Desa Bongas Kecamatan Watukumpul	volume 309x3 m	Hasil musrenbang Watukumpul 2021 Nomor 04	130.000.000
16	Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Cibelok-Banjardawa-Kaligelang (480 X 4 M) (Desa Cibelok Kecamatan Taman Musrengbang kec 06)	Cibelok	Taman	Terlaksananya Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Cibelok-Banjardawa-Kaligelang Desa Cibelok Kecamatan Taman	(480 X 4 M)	Musrengbang kec Tmaan Nomor 06	150.000.000

17	Pembangunan Saluran Irigasi Ukuran 400 M RT.05,06,11,12 RW 02 desa Cibiyuk (Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 3)	Cibiyuk	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi RT.05,06,11,12 RW 02 desa Cibiyuk	Ukuran 400 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 3	204.234.045
18	Pengaspalan jalan antar Desa Cikendung ke Desa Pulosari (Musrenbang Kecamatan 2021 nomor 5)	Cikendung	Pulosari	Terlaksananya Pengaspalan jalan antar Desa Cikendung ke Desa Pulosari		Musrenbang Kecamatan 2021 nomor 5	125.000.000
19	Pelebaran jalan dan talud Dusun Jawar ke Dusun Srawadadi Desa Clekatakan, Kec.Pulosari Kab. Pemalang (Musrenbang Kecamatan 2021)	Clekatakan	Pulosari	Terlaksananya Pelebaran jalan dan talud Dusun Jawar ke Dusun Srawadadi Desa Clekatakan, Kec.Pulosari Kab. Pemalang		Musrenbang Kecamatan 2021	125.000.000
20	Pembangunan Talud/senderan volume p.373m x t.1m (Musrenbang Kecamatan Pemalang 2021)	Danasari	Pemalang	Terlaksananya Pembangunan Talud/senderan	volume p.373m x t.1m	Musrenbang Kecamatan Pemalang 2021	260.000.000
21	Talud sungai Buangan volume 517 x 1,5 x 0,40 M3 (Musrenbang Kecamatan Comal 2)	Gandu	Comal	Terlaksananya pembuatan Talud sungai Buangan	volume 517 x 1,5 x 0,40 M3	Musrenbang Kecamatan Comal 2	260.000.000
22	Pembuatan drainase jalan di RT 07 RW 02, volume 200mx0,5mx0,3m dengan perkiraan dana (musrenbang Watukumpul 2021 08)	Gapura	Watukumpul	Terlaksananya Pembuatan drainase jalan di RT 07 RW 02	volume 200mx0,5mx0,3m	Hasil musrenbang Kec Watukumpul 2021 Nomor 08	112.500.000
23	Pembangunan Sender Jalan Desa Gembyang- Mejangong Dusun Cengis dengan Volume P=500m x L=2m x T=0.30m Desa Gembyang (Musrenbang Kecamatan Randudongkal 03)	Gembyang	Randudongkal	Terlaksananya Pembangunan Sender Jalan Desa Gembyang- Mejangong Dusun Cengis Desa Gembyang	Volume P=500m x L=2m x T=0.30m	Musrenbang Kecamatan Randudongkal 03	350.000.000
24	Pembangunan dan pengerasan jalan lingkaran desa Glandang 1.000 m X 4 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 09)	Glandang	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan dan pengerasan jalan lingkaran desa Glandang	1.000 m X 4 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang 09	150.000.000

25	Pengerasan Jalan Pertanian Gondang - Sitemu dan 2 Jembatan (P. 450 X L. 4 M) (Desa Gondang Kecamatan Taman Musrengbangkec 11)	Gondang	Taman	Terlaksananya Pengerasan Jalan Pertanian Gondang - Sitemu dan 2 Jembatan di Desa Gondang Kecamatan Taman	P. 450 X L. 4 M	Hasil Musrengbang Kec Taman No 11	130.000.000
26	Pembangunan Jembatan Gunungtiga-Belik Rimpak Rt.01/Rw.01, Volume 1 unit ukuran= p=4m, l=3m, t=0,2m sayap=5x1,5x0,4 di desa Gunungtiga (Musrengbang Kecamatan Belik Nomor Urut 2)	Gunungtiga	Belik	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gunungtiga-Belik Rimpak Rt.01/Rw.01 di desa Gunungtiga	Volume 1 unit ukuran = p=4m, l=3m, t=0,2m dengan sayap = 5x1,5x0,4	Hasil musrengbang Kecamatan Belik Nomor Urut 2	400.000.000
27	Pembangunan Badan Jalan dan Jembatan Beton Desa Gunungtiga, Volume 127 m x 2,5 m ; 6 x 3 x 2,7 (Hasil Musrengbang Kecamatan Tahun 2021 Nomor 5)	Gunungtiga	Belik	Terlaksananya Pembangunan Badan Jalan dan Jembatan Beton Desa Gunungtiga	Volume 127 m x 2,5 m ; 6 x 3 x 2,7	Hasil Musrengbang Kecamatan Tahun 2021 Nomor 5	130.000.000
28	Talud Jalan Penghubung Desa Iser-Siranggang P=400 M Desa Iser	Iser	Petarukan	Terlaksananya pembuatan Talud Jalan Penghubung Desa Iser-Siranggang di Desa Iser	P=400 M		160.000.000
29	Pembangunan Talud Jalan Ukuran 220 x 0.3 x 0.7 M Jl Kali Semut desa Jatirejo Hasil Musrengbang Kecamatan Ampelgading Nomor 3	Jatirejo	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jl Kali Semut desa Jatirejo	Ukuran 220 x 0.3 x 0.7 M	Hasil Musrengbang Kecamatan Ampelgading Nomor 3	119.211.045
30	Pembangunan Jalan Telford dengan Volume 480 m X 3 m Desa Jatiroyom (Musrengbang Kecamatan Bodeh)	Jatiroyom	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Telford Desa Jatiroyom	dengan Volume 480 m X 3 m	Musrengbang Kecamatan Bodeh	145.000.000
31	Talud Penghubung Jalan Pertanian Penghubung Jebed Utara dan Karang Talud Barat (P. 1.500 X L. 0,30 X T 1 M) (Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Musrengbangkec 10)	Jebed Selatan	Taman	Terlaksananya pembangunan Talud Penghubung Jalan Pertanian Penghubung Jebed Utara dan Karang Talud Barat di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman	P. 1.500 X L. 0,30 X T 1 M	Hasil Musrengbang Kec Taman No 10	140.000.000

32	Pembangunan Jalan Desa Jojogan - Bodas, Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul, volume 402x2,5x0,12, perkiranaan dana (musrenbang Watukumpul 2021 06)	Jojogan	Watukumpul	Terlaksananya Pembangunan Jalan Desa Jojogan - Bodas, Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul perkiranaan dana	volume 402x2,5x0,12	Hasil Musrenbang Kec Watukumpul 2021 Nomor 06	140.000.000
33	Pembangunan Talud Jalan Pertanian Blok Gempol dengan Volume 480 m Desa Jraganan (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Jraganan	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pertanian Blok Gempol Desa Jraganan	Volume 480 m	Musrenbang Kecamatan Bodeh	200.000.000
34	Pembangunan jembatan Sungai Reas penghubung Dusun Krajan ke Dusun Cikunang (Musrenbang Kecamatan Pulosari 2021-2)	Jurangmangu	Pulosari	Terlaksananya Pembangunan jembatan Sungai Reas penghubung Dusun Krajan ke Dusun Cikunang		Hasil Musrenbang Kecamatan Pulosari 2021 No.2	278.000.000
35	Pengerasan Jalan Rabat Beton 225 m x 3,20 m x 0,15 m Desa Kalirandu (Musrenbang Kecamatan Petarukan 04)	Kalirandu	Petarukan	Terlaksananya Pengerasan Jalan Rabat Beton di Desa Kalirandu	225 m x 3,20 m x 0,15 m	Musrenbang Kecamatan Petarukan 04	170.000.000
36	Pengaspalan jalan penghubung antara Desa Suru dengan Dukuh Blendung Desa Karanganyar 700 m X 3 m X 0,15 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 08)	Karanganyar	Bantarbolang	Terlaksananya pengaspalan jalan penghubung antara Desa Suru dengan Dukuh Blendung Desa Karanganyar	700 m X 3 m X 0,15 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang 08	160.000.000
37	Pembangunan Talud dengan Volume 200 m X 2 sisi Desa Karangbrai (Musrenbang Kecamatan Bodeh0	Karangbrai	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Desa Karangbrai	Volume 200 m X 2 sisi	Musrenbang Kecamatan Bodeh	170.000.000
38	Pembangunan Jalan Telford Ukuran 310 x 3 x 0.2 M Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 7	Karangtalok	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Jalan Telford	Ukuran 310 x 3 x 0.2 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 7	71.261.045

39	Pembangunan Talud Jalan Pertanian Dusun I dan Dusun II dengan Volume 400 m X 2 sisi Desa Kebandaran (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Kebandaran	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pertanian Dusun I dan Dusun II Desa Kebandaran	dengan Volume 400 m X 2 sisi	Musrenbang Kecamatan Bodeh	332.400.000
40	Pelebaran Jembatan Penghubung Desa Pepedan dan Desa Gendowang (lanjutan) (8m x 4 m) (Musrenbang Kecamatan Moga 2)	Kebanggan	Moga	Terlaksananya Pelebaran Jembatan Penghubung Desa Pepedan dan Desa Gendowang (lanjutan)	8m x 4 m	Musrenbang Kecamatan Moga No 2	280.000.000
41	Rabat Beton Jalan Pertanian volume 400 x 2 x 0,15 M3 RT.01 RW.01 desa Kebojongan (Musrenbang Kecamatan Comal 5)	Kebojongan	Comal	Terlaksananya Rabat Beton Jalan Pertanian desa Kebojongan	volume 400 x 2 x 0,15 M3 RT.01 RW.01	Musrenbang Kecamatan Comal No 5	160.000.000
42	Pembangunan drainase RT 01 RW 03 Desa Kebon gede 1.000 m X 0,40 m X 0,50 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 11)	Kebon Gede	Bantarbolang	Teraksananya Pembangunan drainase RT 01 RW 03 Desa Kebon gede	1.000 m X 0,40 m X 0,50 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang 11	135.000.000
43	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kejambon Kluweng - Desa Sokawangi (P. 600 X L. 0,30 X T 0,90) (Desa Kejambon Kecamatan Taman Musrengbangkec 09)	Kejambon	Taman	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Penghubung Desa Kejambon Kluweng - Desa Sokawangi	P. 600 X L. 0,30 X T 0,90	Hasil Musrenbang Kecamatan Taman Nomor 09	140.000.000
44	Pembangunan Talud Jalan dengan Volume 170 m X 2 sisi Desa Kelangdepok (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Kelangdepok	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Kelangdepok	Volume 170 m X 2 sisi	Musrenbang Kecamatan Bodeh	144.781.066
45	Pembangunan Talud Jalan Desa Kemuning - Wonogiri Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 5	Kemuning	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jalan Desa Kemuning - Wonogiri	Ukuran 120 x 0.3 x 1.2 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 5	92.577.045

46	Jalan Rabat Beton Rt 07 Rw 03 600 m x 3 m Desa Kendalrejo (Musrenbang Kecamatan Petarukan 07)	Kendalrejo	Petarukan	Terlaksananya Jalan Rabat Beton Desa Kendalrejo	Rt 07 Rw 03 600 m x 3 m	Musrenbang Kecamatan Petarukan 07	160.000.000
47	Pembangunan Rabat Beton P=448 L=3,5 M Desa Kendalsari (Musrenbang Kecamatan Petarukan 02)	Kendalsari	Petarukan	terlaksananya Pembangunan Rabat Beton di Desa Kendalsari	P=448 L=3,5 M	(Musrenbang Kecamatan Petarukan 02)	200.000.000
48	Pembangunan jalan rabat beton jalan poros Limbangan-Ketapang, volume 400x2,25x0,20 (Musrenbang Kecamatan Ulujami Tahun 2022 No. 3)	Ketapang	Ulujami	Terlaksananya Pembangunan jalan rabat beton jalan poros Limbangan-Ketapang	volume 400x2,25x0,20	Musrenbang Kecamatan Ulujami Tahun 2022 No. 3	300.000.000
49	Talud jalan pertanian volume 600 x 0,90 x 0,30 M3 (Musrenbang kecamatan comal 3)	Klegen	Comal	Terlaksananya pembuatan Talud jalan pertanian	volume 600 x 0,90 x 0,30 M3	Hasil Musrenbang kecamatan comal Nomor 3	250.000.000
50	Pembangunan Talud Jalan Desa Kreyo - Kalimas Dusun Krajan dengan Volume P=450 m x L=0,4m x T=0,5 m Desa Kreyo (Musrenbang Kecamatan Randudongkal tahun 2021 No.01)	Kreyo	Randudongkal	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Kreyo - Kalimas di Dusun Krajan Desa Kreyo	dengan Volume P=450 m x L=0,4m x T=0,5 m	Musrenbang Kecamatan Randudongkal tahun 2021 Nomor 1	170.000.000
51	Pembangunan rabat beton jalan penghubung desa Glandang dengan dusun Sipanjang Desa Kuta 400 m X 3,5 m X 0,20 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 05)	Kuta	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan rabat beton jalan penghubung desa Glandang dengan dusun Sipanjang Desa Kuta	400 m X 3,5 m X 0,20 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang Nomor 05	160.000.000
52	Talud jalan, volume 400x9,6x0,3 Desa Limbangan (Musrenbang Kecamatan Ulujami 2021 No. 6)	Limbangan	Ulujami	Terlaksananya pembuatan Talud jalan Desa Limbangan	volume 400x9,6x0,3	Musrenbang Kecamatan Ulujami 2021 No. 6	140.000.000

53	Pembangunan Jalan Telford ruas Longkeyang-Pegiliran dengan Volume 560 m X 3 m Desa Longkeyang (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Longkeyang	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Telford ruas Longkeyang-Pegiliran Desa Longkeyang	dengan Volume 560 m X 3 m	Musrenbang Kecamatan Bodeh	170.000.000
54	Pembangunan Jalan Aspal Menuju Embung Desa Ukuran 500 x 2.5 M Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 2	Losari	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal Menuju Embung Desa	Ukuran 500 x 2.5 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 2	159.234.045
55	Pembuatan talud jalan pertanian di RT 08 RW 04 Dukuh Penusupan, Desa majakerta Kecamatan Watukumpul, volume 160mx1,5mx0,5m dengan perkiraan dana (musrenbang Watukumpul 2021 07)	Majakerta	Watukumpul	Terlaksannaya Pembuatan talud jalan pertanian di RT 08 RW 04 Dukuh Penusupan, Desa majakerta Kecamatan Watukumpul	volume 160mx1,5mx0,5m	Hasil musrenbang Watukumpul 2021 nomor 07	113.436.917
56	Pembangunan Gedung Serbaguna Curug Sidok 600 m x 3 m (Musrenbang Kecamatan Moga 6)	Mandiraja	Moga	Terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna Curug Sidok	600 m x 3 m	Musrenbang Kecamatan Moga Nomor 6)	150.000.000
57	Rekomendasi : Pengaspalan Jalan Medayu-Pagelaran dan plat besi, Desa Medayu Kecamatan Watukumpul dengan volume 340 M x 3 M (musrenbang Watukumpul 02)	Medayu	Watukumpul	Terlaksananya Rekomendasi : Pengaspalan Jalan Medayu-Pagelaran dan plat besi di Desa Medayu Kecamatan Watukumpul	volume 340 M x 3 M	Hasil musrenbang Kec Watukumpul Nomor 02	150.000.000
58	Rabat Jalan Jumbleng-Kalimangir Rt.01/Rw.12 Desa Mendelem, Volume 1500 m x 2,5 m x 15 cm (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2022 Nomor Urut 1)	Mendelem	Belik	Terlaksannaya pembuatan Rabat Jalan Jumbleng-Kalimangir Rt.01/Rw.12 Desa Mendelem	Volume 1500 m x 2,5 m x 15 cm	Hasil Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2022 Nomor Urut 1	400.000.000
59	Rabat Jalan ke Dukuh Planjan Desa Mendelem, Volume 380 m x 3 m x 12 cm (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 Nomor Urut 1)	Mendelem	Belik	Terlaksananya pembuatan Rabat Jalan ke Dukuh Planjan Desa Mendelem	Volume 380 m x 3 m x 12 cm	Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 Nomor Urut 1	169.590.000

60	Pembangunan Jalan Pertanian Dusun III dengan Volume 175 m X 2 sisi Desa Muncang (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Muncang	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Jalan Pertanian Dusun III Desa Muncang	Volume 175 m X 2 sisi	Hasil Musrenbang Kecamatan Bodeh	146.000.000
61	Jalan penghubung wisata antara Desa Nyalembeng ke Desa Pulosari (Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022)	Nyalembeng	Pulosari	Terlaksananya Jalan penghubung wisata antara Desa Nyalembeng ke Desa Pulosari		Hasil Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022	230.000.000
62	Pembangunan jalan dusun tingkir P=400 L= 3M Desa nyamplungsari (Musrenbang kecamatan petarukan 01)	Nyamplungsari	Petarukan	Terlaksananya Pembangunan jalan dusun tingkir Desa nyamplungsari	P=400 L= 3M	Hasil Musrenbang kecamatan petarukan Nomor 01	200.000.000
63	Pembangunan jalan rabat beton (jalan penghubung Desa Pabuaran Kec.Bantarbolang ke desa Parunggalih Kec. Bodeh) 450 m X 3 m X 0,15 M (Musrenbang Kec. Bantarbolang 01)	Pabuaran	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan jalan rabat beton (jalan penghubung Desa Pabuaran Kec.Bantarbolang ke desa Parunggalih Kec. Bodeh)	450 m X 3 m X 0,15 M	Hasil Musrenbang Kec. Bantarbolang nomor 01	225.000.000
64	Peningkatan Jalan Desa Pagelaran - Bodas dengan volume 385x3x0,15 m (musrenbang Watukumpul 2021 03)	Pagelaran	Watukumpul	Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Pagelaran - Bodas	volume 385x3x0,15 m	Hasil musrenbang Watukumpul 2021 Nomor 03	169.000.000
65	Pembangunan jalan tembus dan jembatan gilikar Desa Pagenteran ke Desa Batursari (Musrenbang Kecamatan 2021)	Pagenteran	Pulosari	Terlaksananya Pembangunan jalan tembus dan jembatan gilikar Desa Pagenteran ke Desa Batursari		Hasil Musrenbang Kecamatan 2021	125.000.000
66	Peningkatan jalan rabat beton (jalan penghubung desa Peguyangan dengan desa Lenggerong Kec.Bantarbolang) 250 m X 4 M x 0,15 M (Musrenbang Kec. Bantarbolang 02)	Paguyangan	Bantarbolang	Terlaksananya Peningkatan jalan rabat beton (jalan penghubung desa Peguyangan dengan desa Lenggerong Kec.Bantarbolang)	250 m X 4 M x 0,15 M	Musrenbang Kec. Bantarbolang Nomor 02	200.000.000

67	Pengaspalan Jalan Jojogan Desa Pakembaran - Desa Cerih Kec. Jatinegara 300 M x 3 M (Musrenbangkec 2022. 03) Jalan poros perekonomian	Pakembaran	Warungpring	Terlaksananya Pengaspalan Jalan Jojogan Desa Pakembaran - Desa Cerih Kec. Jatinegara Jalan poros perekonomian	300 M x 3 M	Hasil Musrenbang kecWarungpring 2022 Nomor 03	200.000.000
68	Tanggul penahan air laut, volume 150x0,9x0,3 (Musrenbang Kecamatan Ulujami 2021 No. 4)	Pamutih	Ulujami	Terlaksananya pembuatan Tanggul penahan air laut	volume 150x0,9x0,3	Hasil Musrenbang Kecamatan Ulujami 2021 Nomor 4	150.000.000
69	Pembangunan jalan rabat beton (dusun pedagung - dusun gemanti) desa Pedagung 800 m X 1 m X 0,10 m dan pembuatan drainase 280 m X 0,4 m X 0,6 m (musrenbang Kec. Bantarbolang 03)	Pedagung	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan jalan rabat beton (dusun pedagung - dusun gemanti) desa Pedagung dan pembuatan drainase	800 m X 1 m X 0,10 m dan 280 m X 0,4 m X 0,6 m	Musrenbang Kec. Bantarbolang nomor 03	200.000.000
70	Pembangunan Jalan Telford P=986 M Desa Pegundan	Pegundan	Petarukan	Terlaksannaya Pembangunan Jalan Telford Desa Pegundan	P=986 M		160.000.000
71	Peningkatan jalan antar Desa Penakir ke Desa Gunungsari (Musrenbang Kecamatan 2022)	Penakir	Pulosari	Terlaksananya Peningkatan jalan antar Desa Penakir ke Desa Gunungsari		Hasil Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022	290.528.459
72	Pembangunan Talud Jalan Blok Lengkong dengan Volume 175 m X 2 sisi Desa Pendowo (Musrenbang Kecamatan Bodeh)	Pendowo	Bodeh	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Blok Lengkong Desa Pendowo	Volume 175 m X 2 sisi	Hasil Musrenbang Kecamatan Bodeh	146.000.000
73	Peningkatan Jalan (Pengaspalan Jalan Antar Kecamatan) Desa Pener - Tegal sari Barat Kecamatan Ampelgading (RW 04 Dusun Kebandingan) (400 M X 3 M) (Desa Pener Kecamatan Taman Musrengbangkec 03)	Pener	Taman	Terlaksananya Peningkatan Jalan (Pengaspalan Jalan Antar Kecamatan) Desa Pener - Tegal sari Barat Kecamatan Ampelgading (RW 04 Dusun Kebandingan)	400 M X 3 M	Hasil Musrengbang Kec Taman Nomor 03)	175.000.000

74	Makadam Blok Pekuncen (P. 800 X L. 4 M) (Desa Penggarit Kecamatan Taman Musrenbangkec 04)	Penggarit	Taman	Terlaksananya Makadam Blok Pekuncen di desa Penggarit Kecamatan Taman	P. 800 X L. 4 M	Musrenbang Kec Taman Nomor 04	170.000.000
75	Pembangunan Jembatan menuju Kantor Balai Desa Pepedan 18 m x 3,5 m (Musrenbang Kecamatan Moga 5)	Pepedan	Moga	Terlaksananya Pembangunan Jembatan menuju Kantor Balai Desa Pepedan	18 m x 3,5 m	Hasil Musrenbang Kecamatan Moga 5	160.000.000
76	Pembangunan Jalan Rabat Beton P=800 M L=2,5 M Desa Pesucen (Musrenbang Kecamatan Petarukan 09)	Pesucen	Petarukan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton di Desa Pesucen	P=800 M L=2,5 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Petarukan Nomor 09	140.000.000
77	Pembangunan Talud Jalan P=400 M Desa Petanjungan (Musrenbang Kecamatan Petarukan 11)	Petanjungan	Petarukan	Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Desa Petanjungan	P=400 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Petarukan Nomor 11	125.000.000
78	Pembangunan Jembatan dan Talud Pule Desa Plakaran 6 m x 6 m x 35 m (Musrenbang Kecamatan Moga 4)	Plakaran	Moga	Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Talud Pule Desa Plakaran	6 m x 6 m x 35 m	Hasil Musrenbang Kecamatan Moga 4	170.000.000
79	Pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong (Musrenbang Kecamatan 2021)	Pulosari	Pulosari	Terlaksananya Pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong		Hasil Musrenbang Kecamatan 2021	145.000.000
80	Pembangunan rabat beton jalan utama dusun Purana Timur Desa Purana 500 m X 3 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 10)	Purana	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan rabat beton jalan utama dusun Purana Timur Desa Purana	500 m X 3 m	Hasil Musrenbang Kec. Bantarbolang Nomor 10	140.000.000
81	Normalisasi dan Talud Kali Banger volume 179 x 1,5 x 0,4 M3 RT.002 RW.002 (Musrenbang Kecamatan Comal 4)	Purwosari	Comal	Terlaksananya Normalisasi dan Talud Kali Banger RT.002 RW.002	volume 179 x 1,5 x 0,4 M3	Hasil Musrenbang Kecamatan Comal Nomor 4	168.790.000

82	Perbaikan jalan (rabat beton/aspal) Rowosari-Wiyorowetan-Tasikrejo-Samong-Kaliprau, Volume 3000m X 0,18m X 3m di desa Samong (Musrenbang Kecamatan Ulujami 2022 No. 1)	Samong	Ulujami	Terlaksananya Perbaikan jalan (rabat beton/aspal) Rowosari-Wiyorowetan-Tasikrejo-Samong-Kaliprau di desa Samong	Volume 3000m X 0,18m X 3m	Hasil Musrenbang Kecamatan Ulujami 2022 No. 1	400.000.000
83	Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Pertanian Blok Plered Ukuran 300 x 3 x 0.2 M Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 1	Sidokare	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Pertanian Blok Plered	Ukuran 300 x 3 x 0.2 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 1	215.999.996
84	Pembangunan Sarpras Desa Wisata Desa Sikasur - Pembangunan Gapura dan Pagar (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 No.2, Gapura 1 unit, pagar 1,5x55)	Sikasur	Belik	Terlaksananya Pembangunan Sarpras Desa Wisata Desa Sikasur - Pembangunan Gapura dan Pagar	Gapura 1 unit, pagar 1,5x55	Hasil Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 No.2	170.000.000
85	Pengaspalan Jalan Dusun Barong Desa Simpur, volume 388x3 (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 Nomor Urut 3)	Simpur	Belik	Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Barong Desa Simpur	volume 388x3	Hasil Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 Nomor Urut 3	159.371.000
86	Talud Jalan Desa Sirangkang - Widodaren P=500 M Desa Sirangkang (Musrenbang Kecamatan Petarukan 10)	Sirangkang	Petarukan	Terlaksananya pembuatan Talud Jalan Desa Sirangkang - Widodaren Desa Sirangkang	P=500 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Petarukan 10	130.000.000
87	Pembangunan jalan rabat beton di desa Siremeng (Musrenbang Kecamatan 2021)	Siremeng	Pulosari	Terlaksananya Pembangunan jalan rabat beton di desa Siremeng		Hasil Musrenbang Kecamatan 2021	125.000.000
88	Peningkatan Jalan Antar Desa Sokawangi - Desa Pener Blok Ampel (600 M X 3 M) Desa Sokawangi (Musrenbang Kecamatan Taman 01)	Sokawangi	Taman	Terlaksananya Peningkatan Jalan Antar Desa Sokawangi - Desa Pener Blok Ampel Desa Sokawangi	600 M X 3 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Taman 01	238.000.000

89	Pembangunan Drainase Beton Ukuran 195 x 1 x 1.5 M, Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 4	Sokawati	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Drainase Beton	Ukuran 195 x 1 x 1.5 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 4	99.138.045
90	Pembangunan Jalan Pertanian dukuh Siketul Desa Tambi Kecamatan Watukumpul, dengan volume 293 m x 3,5 m x 0,15 m (musrenbang Watukumpul 01)	Tambi	Watukumpul	Terlaksananya Pembangunan Jalan Pertanian dukuh Siketul Desa Tambi Kecamatan Watukumpul	volume 293 m x 3,5 m x 0,15 m	Hasil musrenbang Kecamatan Watukumpul 01	200.000.000
91	Normalisasi Sungai dan Jembatan Plat Deker Dusun Krajan dengan Volume 300/500X1,2/2X0,5:7X2X1 Desa Tanahbaya (Musrenbang Kecamatan Randudongkal tahun 2021 No.2	Tanahbaya	Randudongkal	Terlaksananya Normalisasi Sungai dan Jembatan Plat Deker Dusun Krajan di Desa Tanahbaya	Volume 300/500X1,2/2X0,5:7X2 X1	Hasil Musrenbang Kecamatan Randudongkal tahun 2021 No.2	140.000.000
92	Peningkatan Jalan Kualitas Desa Tegalmlati P=350 M x L=4 M T= 0,2 M Desa Tegalmlati (Musrenbang Kecamatan Petarukan 05)	Tegalmlati	Petarukan	Terlaksananya Peningkatan Jalan Kualitas Desa Tegalmlati	P=350 M x L=4 M T= 0,2 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Petarukan 05	160.000.000
93	Pembangunan Jembatan Gantung Ukuran Panjang 60 M Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 1	Tegalsari Timur	Ampelgading	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantung	Ukuran Panjang 60 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 1	201.510.000
94	Rabat Beton Jalan Pertanian volume 246 x 3 x 0,15 (Musrenbang Kecamatan Comal 6)	Tumbal	Comal	Terlaksananya Pembuatan Rabat Beton Jalan Pertanian	volume 246 x 3 x 0,15	Hasil Musrenbang Kecamatan Comal Nomor 6	159.220.000
95	Pembangunan Rabat Beton (Joging Trek) Ukuran 320 x 3 x 0.5 M Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 8	Ujunggede	Ampelgading	Pembangunan Rabat Beton (Joging Trek)	Ukuran 320 x 3 x 0.5 M	Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 8	75.000.000

96	Pembangunan bendungan wanalaya untuk irigasi pertanian desa wanarata 100 m (Musrenbang Kec. Bantarbolang 04)	Wanarata	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan bendungan wanalaya untuk irigasi pertanian desa wanarata	100 m	Hasil Musrenbang Kec. Bantarbolang Nomor 04	170.000.000
97	Pengaspalan Talud Jalan (bronjong) Jalan Desa Wangkelang RT.03 & 06/RW.01 dan RT.07,08,09 &10/RW.02menuju Kalisaleh (7m x 20m) (Musrenbang Kecamatan Moga 1)	Wangkelang	Moga	Terlaksannaya Pengaspalan Talud Jalan (bronjong) Jalan Desa Wangkelang RT.03 & 06/RW.01 dan RT.07,08,09 &10/RW.02menuju Kalisaleh	7m x 20m	Hasil Musrenbang Kecamatan Moga Nomor 1	325.000.000
98	Pembangunan Drainase Jalan Raya Warungpring 300M x 0,25x0,6 (Musrenbangkec 2021.01)	Warungpring	Warungpring	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Raya Warungpring	300M x 0,25x0,6	Hasil Musrenbang kec 2021Nomor 01	212.553.705
99	Peningkatan Jalan Desa Watukumpul - Tambi, Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul, volume 402x2,5x0,12 (musrenbang Watukumpul 2021 02)	Watukumpul	Watukumpul	Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Watukumpul - Tambi, Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul	volume 402x2,5x0,12	Hasil musrenbang Watukumpul 2021 Nomor 02	150.000.000
100	Pembangunan Jalan Rabat Beton P= 448M L=3M T=0,2M Desa Widodaren (Musrenbang Kecamatan Petarukan 03)	Widodaren	Petarukan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Widodaren	P= 448M L=3M T=0,2M	Hasil Musrenbang Kecamatan Petarukan Nomor 03	200.000.000
101	Pembangunan jalan pertanian, Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, volume 275x3x0,12 m (musrenbang Watukumpul 2021 05)	Wisnu	Watukumpul	Terlaksananya Pembangunan jalan pertanian, Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul	volume 275x3x0,12 m	Hasil musrenbang Kec Watukumpul 2021 Nomor 05	160.000.000
Jumlah							18.561.592.458

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 1 (satu) hasil musrenbang yang tidak dicairkan dananya, yaitu musrenbang dari Kecamatan Moga untuk kegiatan Rumah Olah Sampah di Desa Moga Kecamatan Moga sebesar Rp.169.310.000,00. Hal ini disebabkan tidak adanya pengajuan pencairan dana dari desa moga terkait kegiatan tersebut sampai dengan 31 Desember 2021. Desa Moga tidak menyampaikan pengajuan pencairan dengan alasan dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan Rumah Olah Sampah.

Selain Hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang atau aspirasi anggota DPRD. Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD/Aspirasi Anggota DPRD yang telah diusulkan melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2023 terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8
Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PENGUSUL	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
	SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN					
	<i>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa</i>					
1	Pembangunan Embung 16 x 40 meter RT 13 RW 02 Desa Widodaren Petarukan	Widodaren Petarukan	Terlaksananya Pembangunan Embung 16 x 40 meter RT 13 RW 02 Desa Widodaren Petarukan	640 meter	DALIWAN, S.Pd FPKS	200.000.000
2	pengaspalan jalan RT 3 RW2 sepanjang 200 m ds Blimbing Ampelgading	Blimbing Ampelgading	Terlaksananya pengaspalan jalan RT 3 RW2 sepanjang 200 m ds Blimbing Ampelgading	200 meter	DALIWAN, S.Pd FPKS	90.000.000
3	Pembangunan rabat beton Gang Amangkurat 253 m desa Petanjungan Petarukan	Petanjungan Petarukan	Terlaksananya Pembangunan rabat beton Gang Amangkurat 253 m desa Petanjungan Petarukan	253 meter	DALIWAN, S.Pd FPKS	80.000.000
4	Perkerasan jalan RT 18 RW 04 Desa Sidokare	Sidokare Ampelgading	Terlaksananya Perkerasan jalan RT 18 RW 04 Desa Sidokare	700 meter	Drs. BAMBANG SETIJONO FPDIP	200.000.000
5	Rehab Kantor Balai desa Ujunggede	Ujunggede Ampelgading	Terlaksananya Rehab Kantor Balai desa Ujunggede	1 paket	Drs. BAMBANG SETIJONO FPDIP	200.000.000

6	Pengaspalan jalan Pierre Tendean Desa Banglaragan	Banglaragan	Ampelgading	Terlaksananya Pengaspalan jalan Pierre Tendean Desa Banglaragan	500 meter	Drs. BAMBANG SETIJONO	FPDIP	200.000.000
7	Rabat beton jalan gang Prau Desa Karangtalok	Karangtalok	Ampelgading	Terlaksananya rabat beton jalan gang Prau Desa Karangtalok	150 meter	Drs. BAMBANG SETIJONO	FPDIP	200.000.000
8	Rabat Beton jalan RT 17 RW 05, Desa Karangmoncol	Karangmoncol	Randudongkal	Terlaksannaya Rabat Beton jalan RT 17 RW 05, Desa Karangmoncol	160 meter	DWI LAKSARI, S.Pd	FPDIP	200.000.000
9	Rabat Beton Jalan	Kejene	Randudongkal	Terlaksananya Rabat Beton Jalan	1 Paket	DYAH WIDIHARTI	FPGolkar	-
10	Talud Lapangan Sepak Bola	Banjaranyar	Randudongkal	Terlaksananya Talud Lapangan Sepak Bola	1 Paket	DYAH WIDIHARTI	FPGolkar	-
11	Pengaspalan jalan	Paguyangan	Bantarbolang	Terlaksannaya Pengaspalan jalan	1 paket	DYAH WIDIHARTI	FPGolkar	-
12	Pengaspalan Jalan	Danasari	Pemalang	Terlaksananya Pengaspalan Jalan	1 paket	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	FPGolkar	-
13	Pengaspalan Jalan	Tambakrejo	Pemalang	Terlaksannaya Pengaspalan Jalan	1 paket	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	FPGolkar	-
14	Talud Jalan	Wanamulya	Pemalang	Terlaksannaya Talud Jalan	1 paket	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	FPGolkar	-
15	Perbaikan lapangan sepak Bola Dukuh Karangmulya Desa Sikasur	Sikasur	Belik	Terlaksananya Perbaikan lapangan sepak Bola Dukuh Karangmulya Desa Sikasur	1 paket	LINDA DWI BHUANA PUTRI	FPDIP	50.000.000
16	Pembangunan jalan Rabat Beton RW 09, Desa Bulakan	Bulakan	Belik	Terlaksannaya Pembangunan jalan Rabat Beton RW 09, Desa Bulakan	1 paket	LINDA DWI BHUANA PUTRI	FPDIP	100.000.000
17	Pengaspalan jalan desa RT 06 RW 01 Desa Kalisaleh	Kalisaleh	Belik	Terlaksananya Pengaspalan jalan desa RT 06 RW 01 Desa Kalisaleh	1 paket	LINDA DWI BHUANA PUTRI	FPDIP	100.000.000
18	pengaspalan jalan Dk. Kepetek Gendowang Moga	Seluruh Kelurahan/Desa	Moga	Terlaksananya pengaspalan jalan Dk. Kepetek Gendowang Moga	600 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	200.000.000
19	pengarungan dan pembuatan tempat duduk penonton lapangan dukuh tumanggal banyumudal Moga	Seluruh Kelurahan/Desa	Moga	Terlaksananya pengarungan dan pembuatan tempat duduk penonton lapangan dukuh tumanggal banyumudal Moga	1 paket	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	250.000.000

20	Pengaspalan jalan rt 05 rw 9 menuju rt 01 rw 10 banyumudal Moga	Banyumudal	Moga	Terlaksananya Pengaspalan jalan rt 05 rw 9 menuju rt 01 rw 10 banyumudal Moga	60 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	15.000.000
21	Pengaspalan jalan rt 01 rw 9 ke rt 04 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	Banyumudal	Moga	Terlaksananya Pengaspalan jalan rt 01 rw 9 ke rt 04 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	250 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	55.000.000
22	pengecoran jalan rt 04 menuju rt 02 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	Banyumudal	Moga	Terlaksannaya pengecoran jalan rt 04 menuju rt 02 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	180 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	50.000.000
23	pengaspalan jalan rt 03 rw 10 banyumudal Moga	Banyumudal	Moga	Terlaksananya pengaspalan jalan rt 03 rw 10 banyumudal Moga	200 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	200.000.000
24	pengaspalan jalan rt 02 rw 09 dukuh tumanggal desa banyumudal kec moga	Banyumudal	Moga	Terlaksananya pengaspalan jalan rt 02 rw 09 dukuh tumanggal desa banyumudal kec moga	200 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	50.000.000
25	pengecoran jalan rt 03 rw 09 dukuh tumanggal desa banyumudal kec moga 200m x 2 m	Banyumudal	Moga	Terlaksananya pengecoran jalan rt 03 rw 09 dukuh tumanggal desa banyumudal kec moga 200m x 2 m	200 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	60.000.000
26	pengaspalan dukuh simadu rw 07dr rt 08 sampai rt 07 banyumudal Moga	Banyumudal	Moga	Terlaksananya pengaspalan dukuh simadu rw 07dr rt 08 sampai rt 07 banyumudal Moga	200 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	50.000.000
27	Pengaspalan jalan dukuh simadu rt 08 rw 07 sampai rt 05 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	Banyumudal	Moga	Terlaksananya Pengaspalan jalan dukuh simadu rt 08 rw 07 sampai rt 05 rw 10 dukuh tumanggal desa banyumudal	200 meter	MUHAMAD AKMAL, S.Farm	FPKS	50.000.000
28	Pengaspalan jalan desa, Dukuh Kertadita Desa Kalimas	Kalimas	Randudongkal	Terlaksananya Pengaspalan jalan desa, Dukuh Kertadita Desa Kalimas	1 paket	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	FPDIP	200.000.000
29	Pengaspalan jalan desa RT 22 RW 02 Blok Kedatuan, Desa Rembul	Rembul	Randudongkal	Terlaksananya Pengaspalan jalan desa RT 22 RW 02 Blok Kedatuan, Desa Rembul	1 paket	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	FPDIP	200.000.000
30	Pengaspalan jalan, jalan Balai desa RT 07 RW 01 Desa Gembyang	Gembyang	Randudongkal	Terlaksananya Pengaspalan jalan, jalan Balai desa RT 07 RW 01 Desa Gembyang	1 paket	NUR AFNA ISTIQOMAH, A.Md	FPDIP	200.000.000
31	Drainase Jalan	Kaligelang	Taman	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan	1 Paket	RABADI	FPGolkar	-
32	Pembangunan Jalan Rabat beton areal tambak Dasun Desa Mojo	Mojo	Ulujami	Terlaksananya Pembangunan Jalan Rabat beton areal tambak Dasun Desa Mojo	600 meter	RESTU MARLIA RIZKY	FPDIP	200.000.000
33	Peningkatan jalan Rabat Beton areal Tambak Desa Mojo	Mojo	Ulujami	Terlaksananya Peningkatan jalan Rabat Beton areal Tambak Desa Mojo	70 meter	RESTU MARLIA R	FPDIP	70.000.000

34	Peningkatan jalan menuju makam Syekh Maulana Maghribi Desa Pesantren	Pesantren	Ulujami	Terlaksananya Peningkatan jalan menuju makam Syekh Maulana Maghribi Desa Pesantren	600 meter	RESTU MARLIA RIZKY	FPDIP	100.000.000
35	Peningkatan jalan Rabat Beton Dukuh Dasun Wilayah Pagak Desa Mojo	Mojo	Ulujami	Terlaksananya Peningkatan jalan Rabat Beton Dukuh Dasun Wilayah Pagak Desa Mojo	700 meter	RESTU MARLIA RIZKY	FPDIP	200.000.000
36	perbaikan jalan poros desa glandang desa kuta rt11 rw02	Glandang	Bantarbolang	Terlaksananya perbaikan jalan poros desa glandang desa kuta rt11 rw02	375 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
37	perbaikan jalan suwandi rt02 rw3, rt01 rw4 desa kuta	Kuta	Bantarbolang	Terlaksananya perbaikan jalan suwandi rt02 rw3, rt01 rw4 desa kuta	321 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
38	perbaikan jalan haji (hj) sholeh rt02,03,05,06,07 rw03 rt08 rw 04 desa pegiringan	Pegiringan	Bantarbolang	Terlaksananya perbaikan jalan haji (hj) sholeh rt02,03,05,06,07 rw03 rt08 rw 04 desa pegiringan	450 m	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
39	PERBAIKAN JALAN kenanga rt 01,02,03 dusun semiliran desa bantarbolang	Bantarbolang	Bantarbolang	Terlaksananya Perbaikan Jalan kenanga rt 01,02,03 dusun semiliran desa bantarbolang	375 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
40	Pembangunan drainase jalan dusun randugunting Desa peguyangan Bantarbolang 444 m	Paguyangan	Bantarbolang	Terlaksananya Pembangunan drainase jalan dusun randugunting Desa peguyangan Bantarbolang 444 m	450 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
41	PERBAIKAN JALAN dusun benteng rt 06 ,08 rw 02 DESA WANARATA	Wanarata	Bantarbolang	Terlaksananya Perbaikan Jalna dusun benteng rt 06 ,08 rw 02 DESA WANARATA	450 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	150.000.000
42	perbaikan Jalan dusun clapar rt 01 02 03 desa karang anyar	Karanganyar	Bantarbolang	Terlaksananya perbaikan Jalan dusun clapar rt 01 02 03 desa karang anyar	450 meter	RINA TIYASTUTI	FPKS	100.000.000
43	Rabat beton jalan benteng dusun silanjar desa jebed selatan.	Jebed Selatan	Taman	Terlaksannaya Rabat beton jalan benteng dusun silanjar desa jebed selatan.	280 meter	SOLICHIN, S.Ag	FPKS	150.000.000
44	Rabat beton jalan RT 01 RW 03 desa penggarit kec. Taman	Penggarit	Taman	Terlaksananya Rabat beton jalan RT 01 RW 03 desa penggarit kec. Taman	100 meter	SOLICHIN, S.Ag	FPKS	70.000.000
45	Bantuan keuangan pemeliharaan dan perawatan GOR Bulu tangkis PB Anggrek desa penggarit kec. Taman	Penggarit	Taman	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan GOR Bulu tangkis PB Anggrek desa penggarit kec. Taman	1 paket	SOLICHIN, S.Ag	FPKS	15.000.000
46	Rabat beton jalan RT 01 RW 03 desa penggarit	Penggarit	Taman	Terlaksananya Rabat beton jalan RT 01 RW 03 desa penggarit	150 meter	SOLICHIN, S.Ag	FPKS	70.000.000
47	Rabat beton jalan lingkungan di RT 05 RW 03 desa penggarit	Penggarit	Taman	Terlaksananya Rabat beton jalan lingkungan di RT 05 RW 03 desa penggarit	150 meter	SOLICHIN, S.Ag	FPKS	50.000.000

48	Pembangunan jogging track lapangan sepak bola desa Sewaka	Sewaka	Pemalang	Terlaksananya Pembangunan jogging track lapangan sepak bola desa Sewaka	1 paket	SRI AMI AYUWARDANI	FPDIP	-
49	Pembangunan Talud dan Pavingisasi area pemakaman Baurekso Desa Bojongnangka	Bojongnangka	Pemalang	Terlaksananya Pembangunan Talud dan Pavingisasi area pemakaman Baurekso Desa Bojongnangka	1 paket	SRI AMI AYUWARDANI	FPDIP	100.000.000
50	Rehab Kantor Sekretariat Desa Sitemu	Sitemu	Taman	Terlaksananya Rehab Kantor Sekretariat Desa Sitemu	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
51	Rehab Kantor Sekretariat Desa Gondang	Gondang	Taman	Terlaksananya	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
52	Rehab Kantor Sekretariat Desa Pener	Pener	Taman	Terlaksananya Rehab Kantor Sekretariat Desa Pener	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
53	Pengaspalan Jalan RT 01, 02 RW 07 Desa Banjaran	Banjaran	Taman	Terlaksananya Pengaspalan Jalan RT 01, 02 RW 07 Desa Banjaran	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
54	Pengaspalan jalan desa Jebed Utara di RT 01 ,04 RW 05	Jebed Utara	Taman	Terlaksananya Pengaspalan jalan desa Jebed Utara di RT 01 ,04 RW 05	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
55	Rabat beton jalan Desa Sitemu di RT 03, 06 RW 01 Desa Sitemu	Sitemu	Taman	Terlaksananya Rabat beton jalan Desa Sitemu di RT 03, 06 RW 01 Desa Sitemu	1 paket	SUYUTI, SH	FPDIP	200.000.000
Jumlah								6.425.000.000

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan kebijakan Refocusing anggaran pada tiap tiap Perangkat Daerah dalam rangka mengatasi defisit anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk salah satu perangkat daerah yang terdampak refocusing anggaran tersebut, sehingga harus mengurangi belanja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelaksanaan fungsi BPKAD dan ketercapaian output kegiatan. Beberapa Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang yang diakomodir pada akun Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, juga terdampak refocusing pada Tahun 2021. Tetapi pokok pikiran tersebut dianggarkan kembali pada Tahun 2022 untuk menjaga keberlanjutan aspirasi masyarakat. Adapun Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang yang terdampak refocusing anggaran Tahun 2021 dan dianggarkan kembali pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Drainase dan Talud/Sender RT.28 RW.05 Desa Asemdayong Kecamatan Taman
2. Pembangunan Jalan Poros Desa Cibuyur menuju Desa Mereng Kec Warungpring
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Kedungbanjar 2 x 300 m x 18 cm di RT.04 Rw.03 Dusun 03 Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman
4. Pengaspalan Jalan antara Desa Banjarsari ke Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang
5. Pengaspalan Jalan Monas dan Jalan Permata Hoki Desa Taman RT.02 RW.05 Kecamatan Taman
6. Pengaspalan Jalan RT.01 RW.01 Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun Keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 bertema *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”*. Penentuan tema dan sasaran dilakukan dengan memperhatikan Sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, dan kebijakan pembangunan tahun 2023, serta beberapa isu strategis. Sedangkan Visi Pembangunan nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah *“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 9 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, presiden Republik Indonesia memberikan arahan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), fokus pada membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).
4. Penyederhanaan birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 disusun dalam rangka menuju Indonesia sebagai Negara Maju, lepas dari Middle Income Trap. Arah kebijakan prioritas pembangunan pada Tahun 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan penyediaan lapangan kerja, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan

Arah kebijakan Kementrian Keuangan Tahun 2023, fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau. Kebijakan Kementrian Keuangan tersebut selaras dengan tema kebijakan fiskal Pemerintah Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan Fiskal Tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kementrian Keuangan berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi fiskal dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja secara efisien dan efektif serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan dunia usaha yang berkelanjutan serta kleestarian lingkungan hidup. Optimalisasi Pendapatan dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil serta mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peratiran Perpajakan yang efektif diharapkan rasio perpajakn akan meningkat, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga optimal karena adanya peningkatan inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset. Adapun secara menyeluruh, arah kebijakan Kementrian Keuangan tersebut sebagai berikut :

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan

- a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan Kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Fiskal dan Sektor Keuangan.
- e. Perumusan Strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrument-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung sustainable environment.
- g. Peningkatan produktifitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sector tertentu.
- j. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementrian Keuangan atau dengan K/L Lainnya.
- k. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.

1. Penguatan kebijakan sector keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat system keuangan.

2. *Penerimaan Negara yang Optimal*

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protocol kesehatan terkait covid-19.
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui system elektronik (PMSE).
- d. Pengembangan Layanan Pajak, Kepabean dan Cukai serta PNBP berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly.
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai serta pemetaan potensi PNBP.
- f. Modernisasi system administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP.
- g. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai.
- h. Penguatan kerja sama dengan Kementrian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
- i. Penguatan Joint program penerimaan di lingkungan Kementrian Keuangan.
- j. Peningkatan Kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial.
- k. Penguatan Pengawasan Perpajakan dan PNBP serta Pemberantasan Penyelundupan dan Barang-barang illegal.
- l. Integrasi dan Konektivitas pelayanan ekspor impor dengan K/L dan negara-negara mitra.
- m. Mendorong penguatan efektivitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.

3. *Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas*

- a. Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, Penggunaan transfer ke daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
- e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting dan money kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- f. Pemantapan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standarisasi program/kegiatan, Outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta system pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (Integrated Funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.

- h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar public dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antar daerah.
- i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan Sistem Insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
- k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
- l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
- m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
- n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan reward and punishment.

4. *Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Resiko yang terkendali.*

- a. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel
- b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
- c. Pengelolaan Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. *Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien.*

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, maka tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Berdikari”. Tema tersebut selaras dengan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Sedangkan misi Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat di Bidang Politik, berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan “ *Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi*”
4. Memperkuat Kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 fokus pada **“Pemulihan Sektor Ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19”**. Sektor yang terpuruk karena pandemi covid-19 adalah Pariwisata dan Pertanian, sehingga pada Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dengan peningkatan eco socio tourism. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dijabarkan pada Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang diarahkan pada :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan

- pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Instansi pada Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan misi yang ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan “*Mboten korupsi dan Mboten Ngapusi*”

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai kaidah perundangan.
2. Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Strategi :

1. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
2. Implementasi kebijakan dan pentahapan paperless.
3. Melakukan validasi data terkait aset di pengguna yang masih layak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yang akan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan kondisi dan status aset melalui BMD.
4. Aset-aset yang saat ini dalam masa pemanfaatan oleh pihak ketiga akan dilakukan penilaian ulang untuk kewajaran harga

sewa (untuk menunjang kenaikan harga sewa).

Arah Kebijakan :

1. Penyesuaian kebijakan dan percepatan penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan serta meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan/pembayaran.
2. Persiapan kebijakan dan system pencairan dalam aplikasi penatausahaan dengan mekanisme paperless.
3. Inventarisasi dan validasi aset serta percepatan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan aset.
4. Implementasi kebijakan dan pentahapan pembayaran non tunai.
5. Implementasi kebijakan dan pentahapan mekanisme paperless.
6. Implementasi kebijakan pengamanan aset secara fisik dan administrasi serta tertib administrasi penatausahaan dan digitalisasi promosi pemanfaatan aset daerah.
7. Perluasan dan pengendalian pembayaran belanja non tunai, baik pengeluaran maupun penerimaan.
8. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dengan Mekanisme Paperless secara bertahap.
9. Perluasan cakupan penatausahaan aset, peningkatan volume aset yang diamankan secara fisik dan administrative dan kenaikan jumlah aset yang idle yang disewakan/dikerjasamakan.
10. Integrasi dan perluasan pembayaran belanja non tunai dan penggunaan aplikasi secara menyeluruh.
11. Pengembangan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless.
12. Integrasi sistem tata usaha aset dan pemanfaatan, upaya mengurangi persentase aset yang belum diamankan secara fisik dan administrative serta alternative pemanfaatan untuk dukungan PAD.
13. Penerapan penggunaan non tunai sesuai optimal.
14. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dengan mekanisme paperless sepenuhnya.
15. Ketepatan jumlah dan nilai barang melalui sensus BMD guna optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

16. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.
17. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah.
18. Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra.

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Terjadinya wabah covid - 19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, memberi dampak sangat signifikan kepada kesejahteraan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 disikapi dengan penyesuaian perumusan kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 yang diselaraskan dengan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah : ***“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi, SDM dan Infrastruktur”***. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut dijabarkan dengan implementasi prioritas pembangunan yaitu :

1. Penguatan Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana;
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
3. Penguatan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang terdampak Pandemi Covid-19 serta penanggulangan kemiskinan ekstrem;
4. Pengembangan Digitalisasi Data, Informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di desa (Desa Digital);
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 juga dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni”**.

Adapun dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, dijabarkan dalam 6 (enam) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan untuk mendukung salah satu misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan misi tersebut, Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang diupayakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;
- d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset daerah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;

- e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset yang dikuasai dan Neraca Daerah.
- f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
- g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pematang Jaya, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang telah diraih sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut yaitu pada Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.2.1. Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah”**. Dalam mencapai tujuan tersebut didukung oleh 2 indikator yaitu :

- Hasil Pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target 80 dan;
- Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan target 93 %.

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;

3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.2.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD terdapat 2 Sasaran yaitu:

Sasaran 1 : "Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", dengan indikator sasaran :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran dengan target bobot nilai 15;
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran dengan target bobot nilai 20;
- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah dengan target bobot nilai 15;
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki dengan target 50 %.

Sasaran 2 : "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", dengan indikator sasarannya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 84,08.

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, sehingga diharapkan semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;

3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ”

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1 1.1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah		Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	80
			Persentase Pemanfaatan BMD	%	93
		Meningkatnya Transparansi dan Akutabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Nilai	15
			Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	Nilai	20

1.2	Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	15
		Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	50
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,08

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dilaksanakan untuk mendukung Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil Makmur Agamis dan Ngangeni. Sedangkan misi yang didukung oleh program kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi kedua yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan responsif. Berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Pemalang maka ditentukan tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang. Selanjutnya tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang tersebut dijabarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dirinci dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan. Adapun tujuan Kabupaten Pemalang yang didukung oleh pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang. Sedangkan sasaran Kabupaten Pemalang yang didukung oleh pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dengan indikator sasaran daerah Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD).

Dari Tujuan dan sasaran daerah tersebut, ditentukanlah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah. Terdapat 2 indikator tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan
2. Persentase Pemanfaatan BMD

Berdasarkan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Terdapat 2 sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Sasaran :

- Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran
- Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran
- Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah
- Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki

Selain untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang, Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditujukan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals /SDGs). Komponen SDGs yang didukung oleh pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang telah meraih opini WTP sebanyak 5 (Lima) kali berturut turut sejak tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021.

Pada Tahun 2023, Terdapat 3 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Pemalang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.1.1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- 1.1.2. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*
- 1.1.3. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD*
- 1.1.4. *Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD*
- 1.1.5. *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD*
- 1.2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 1.1.1 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 1.1.2 *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
 - 1.1.3 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- 1.3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - 1.5.10. *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
- 1.4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 1.6.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.*
 - 1.6.4. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - 1.6.5. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - 1.6.6. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*
 - 1.6.7. *Penyediaan Bahan/Material*
 - 1.6.8. *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - 1.6.9. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 1.6.10. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
- 1.5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.7.1. *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - 1.7.6. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.*
- 1.6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1.8.1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - 1.8.2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 1.8.3. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - 1.8.4. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.9.2. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.*

1.9.6. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

1.9.9. *Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

1.9.10. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2.1.1. *Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*

2.1.2. *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS*

2.1.7. *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD*

2.1.8. *Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.*

2.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1. *Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.*

2.2.7. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).*

2.2.10. *Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.*

2.2.11. *Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.*

2.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3.3. *Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan/Triwulanan dan Semesteran.*

2.3.4. *Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

2.3.5. *Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*

2.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.8. *Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*

2.4.9. *Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.*

2.4.10. *Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.*

2.5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2.5.2. *Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.*

2.5.3. *Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.*

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.7. *Pengamanan Barang Milik Daerah.*

3.2.10. *Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.*

3.2.12. *Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.*

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kecuali untuk Kegiatan analisis Penyaluran Bantuan Keuangan khususnya untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan Tani Manunggal Mandiri Desa (TMMD), dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu ada kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah di Kantor BPKAD dan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi BPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) kecuali kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa atau Masyarakat Desa guna membantu pembangunan dan pemberdayaan di

desa. Selain itu, BPKAD mengelola Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang merupakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka menanggulangi bencana dan membantu korban bencana serta keadaan darurat lainnya. Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pengampu Belanja Tidak Terduga adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pematang Jaya.

Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD pada Tahun 2023 tercantum pada rancangan awal RKPD Tahun 2023. Terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan pada Tahun 2022 dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2022, terdapat 46 sub kegiatan, sedangkan pada Tahun 2023 terdapat 45 sub kegiatan. Perbedaan tersebut karena ada 1 (satu) sub kegiatan yang alokasi anggarannya menunggu kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang merupakan bagian dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Total pagu anggaran pada Renja BPKAD Tahun 2023 sama dengan yang tercantum pada DPA Tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengingat kapasitas anggaran pada Tahun 2023, diperkirakan tidak berbeda jauh dengan Tahun 2022.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 merupakan kegiatan reguler yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Terdapat 3 Program 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Sehubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDGs), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung Goal ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh, Indikator 16.6 Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat dengan indikator 16.6.1.(a) Persentase Peningkatan Opini BPK WTP Kab/Kota. Program Kegiatan dan anggaran yang mendukung indikator SDG's tersebut tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 YANG MENDUKUNG PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG's)

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN TAHUN 2023
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH				
Target 16.6. Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel dan Transparan di semua tingkat				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan	%	100	477.268.562.000
	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60	
	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	
	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	%	100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	Jenis	15	515.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Daerah	Jenis	12	295.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jenis	11	162.400.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tidak Terduga dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	%	90	476.227.662.000
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Keg	2	68.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib administrasi Penatausahaan BMD	%	100	1.709.100.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Dok	8	1.709.100.000

Pemerintah Kabupaten Pematang telah merealisasikan target pada goal 16 SDG's yaitu tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk 6 tahun berturut turut. Hal ini membuktikan keseriusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar terwujud Pengelolaan Keuangan yang baik, sesuai ketentuan, transparan, akuntabel dan melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Pematang. Adapun target dan Realisasi atas Tujuan ke-16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tercantum pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TUJUAN DAN INDIKATOR TPB	TARGET DAN REALISASI											
	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
16.6. Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
16.6.1.(a). Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Selain mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil Makmur Agamis dan Ngangeni”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 misi Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan responsive.
3. Mewujudkan Pembangunan Mental Masyarakat yang agamis.
4. Mewujudkan Keterpaduan Pembangunan pedesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi local.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Dari ke-6 misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung misi yang ke-2 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan responsive”. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjabarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada Tahun 2023 yang mendukung visi dan misi yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat pada table 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan pada Renja BPKAD Tahun 2023
yang mendukung visi dan misi kedua Kabupaten Pemalang

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	477.268.562.000
<i>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	515.000.000
<i>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	295.000.000
<i>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	162.400.000
<i>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	476.227.662.000
<i>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	68.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.709.100.000
<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1.709.100.000

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah			Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	80	487.897.764.000	80	487.897.764.000	BPKAD
				Persentase Pemanfaatan BMD	93%		93%		BPKAD
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.08		84.08		BPKAD
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	15		15		BPKAD
				Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	20		20		BPKAD
				Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	15		15		BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	50 %		50 %		BPKAD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Reformasi Birokrasi di BPKAD	53,20	8.920.102.000	53,30	8.920.102.000	BPKAD
				2. Nilai SAKIP di BPKAD	60,40		60,50		BPKAD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	25.500.000	12 Dokumen	25.500.000	BPKAD
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	BPKAD
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	70 Dokumen	500.000	70 Dokumen	500.000	BPKAD
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Dokumen	3.000.000	100 Dokumen	3.000.000	BPKAD
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD	70 Dokumen	3.000.000	70 Dokumen	3.000.000	BPKAD
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Perubahan DPA SKPD	100 Dokumen	16.000.000	100 Dokumen	16.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi	
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024			
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			DPA SKPD							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Jenis	6.722.043.000	7 Jenis	6.722.043.000	BPKAD	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan (Gaji = 3.582.442.000, Tunjangan = 3.181.409.000)	48 orang	6.707.243.000	48 orang	6.707.243.000	BPKAD	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	25 SK	14.000.000	25 SK	14.000.000	BPKAD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, LPPD dan LKPJ Perangkat Daerah	3 Laporan	800.000	3 Laporan	800.000	BPKAD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya upaya peningkatan kompetensi SDM	1 jenis	280.000.000	1 jenis	280.000.000	BPKAD	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/Seminar/Workshop/Diklat	60 Orang	280.000.000	60 Orang	280.000.000	BPKAD	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung operasional perangkat daerah	10 Jenis	642.559.000	10 Jenis	642.559.000	BPKAD
			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana selama setahun	12 kegiatan	3.000.000	12 kegiatan	3.000.000	BPKAD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor, Makanan dan Minuman harian/kegiatan yang tersedia	32 Jenis	50.000.000	32 Jenis	50.000.000	BPKAD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	11 Jenis	30.000.000	11 Jenis	30.000.000	BPKAD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terlaksana selama setahun	12 kegiatan	5.000.000	12 kegiatan	5.000.000	BPKAD
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pembelian Bendera dan umbul umbul	50 buah	3.000.000	50 buah	3.000.000	BPKAD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah jenis Penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan Makan Minum Tamu yang terlaksana selama setahun	2 Jenis	100.000.000	2 Jenis	100.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokas
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				selama setahun					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	4 Jenis	665.000.000	4 Jenis	665.000.000	BPKA
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama setahun	30 Unit	10.000.000	30 Unit	10.000.000	BPKA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	4 Orang	225.000.000	4 Orang	225.000.000	BPKA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD milik Perangkat Daerah	7 Jenis	190.000.000	7 Jenis	190.000.000	BPKA

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 perorangan dan jabatan milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya - Jumlah STNK Kendaraan Operasional Dinas Roda milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya -Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	53 Unit	150.000.000	53 Unit	150.000.000	BPKAD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	30 unit	10.000.000	30 unit	10.000.000	BPKAD
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	2 lokal	15.000.000	2 lokal	15.000.000	BPKAD
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	15 unit	15.000.000	15 unit	15.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana pemeliharanya selama setahun	12 kegiatan	15.000.000	12 kegiatan	15.000.000	BPKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN KEJANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD sesuai Ketentuan	100 %	477.268.562.000	100 %	477.268.562.000	BPKAD
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum		60 %	60 %		BPKAD		
		Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
		Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan		100 %	100 %		BPKAD		
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	15 jenis	515.000.000	15 jenis	515.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	5 Dokumen	185.000.000	5 Dokumen	185.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya fungsi perbendaharaan Daerah	12 jenis	295.000.000	12 jenis	295.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah - Jumlah Laporan Mutasi Deposito - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito	48 Laporan	94.747.500	48 Laporan	94.747.500	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah SP2D yang diterbitkan - Jumlah Dokumen SKPP yang diterbitkan (240 Lap Poskas, 5.000 SP2D, 500 SKPP)	5740 Dokumen	93.252.500	5740 Dokumen	93.252.500	BPKAD
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	1 Perbup	55.000.000	1 Perbup	55.000.000	BPKAD
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Pembinaan/Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	75 orang	52.000.000	75 orang	52.000.000	BPKAD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Terlaksananya Fungsi Akuntansi dan Pelaporan	11 jenis	162.400.000	11 jenis	162.400.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi	
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024			
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			dan Pelaporan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah						
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Triwulanan Konsolidasi yang tersusun selama setahun	14 Laporan	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	BPKAD	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	38.000.000	1 Dokumen	38.000.000	BPKAD	
			Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	2 Dokumen	107.400.000	2 Dokumen	107.400.000	BPKAD	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bantuan Keuangan, Bantuan Korban Bencana dan Bagi Hasil kepada Masyarakat	90%	476.227.662.000	90 %	476.227.662.000	BPKAD	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Keuangan	211 Desa	453.725.103.000	211 Desa	453.725.103.000	BPKAD
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Proses Penyaluran Belanja Tidak Terduga	50 Dokumen	10.000.000.000	50 Dokumen	10.000.000.000	BPKAD
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	211 Desa	12.502.559.000	211 Desa	12.502.559.000	BPKAD
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kegiatan	68.500.000	2 kegiatan	68.500.000	BPKAD
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibuat dan dipelihara	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	22.000.000	BPKAD
			Pembinaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	75 Orang	46.500.000	75 Orang	46.500.000	BPKAD
			PROGRAM PENGELOLAAN BMD	Presentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	1.709.100.000	100 %	1.709.100.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Ketentuan	8 dokumen	1.709.100.000	8 dokumen	1.709.100.000	BPKAD
			Pengamanan BMD	- Jumlah Tanah Milik Pemda yang terproses sertifikatnya - Jumlah Tanah Pemda yang terpasangi Papan Identitas Tanah Pemda (200 sertifikat, 100 papan)	300 Bidang	1.508.500.000	300 Bidang	1.508.500.000	BPKAD
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang dijaminakan selama setahun - Jumlah Laporan Pemindahtanganan dan Penghapusan - Jumlah Laporan Monitoring Pemanfaatan BMD - Jumlah SPT PBB tanah milik Pemkab yang terbayar - Jumlah Pengadaan Tanah - Jumlah Aset yang telah dimanfaatkan	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	180.000.000	155 Unit, 4 Laporan, 75 SPT, 1 paket, 51 lokasi	180.000.000	BPKAD
			Penyusunan Laporan BMD	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi -	14 Laporan	20.600.000	14 Laporan	20.600.000	BPKAD

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan Tahun 2024				Lokasi	
					Tahun 2023		Perkiraan Maju Tahun 2024			
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Jumlah Laporan Semesteran BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulan dan Triwulanan BMD Konsolidasi						

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta visi misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 serta mempedomani regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Tahun 2023 memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan 2022. Pendanaan Renja BPKAD Tahun 2023 disesuaikan dengan total anggaran pada penetapan APBD Tahun 2022 mengingat kondisi keuangan pada Tahun 2023 tidak berbeda jauh dengan Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPDP Tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, bersinergi dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Pemalang, 29 Juli 2022
KEPALA BPKAD
KABUPATEN PEMALANG

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang. The stamp contains the text 'PEMALANG KABUPATEN PEMALANG' around the perimeter and 'BPKAD' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. SLAMET MASDUKI, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003/199303 1 006